



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

MONOPOLI SAHAM PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI ASAS DEMOKRASI EKONOMI DI INDONESIA

TESIS



DONI FITRA

0821211057

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

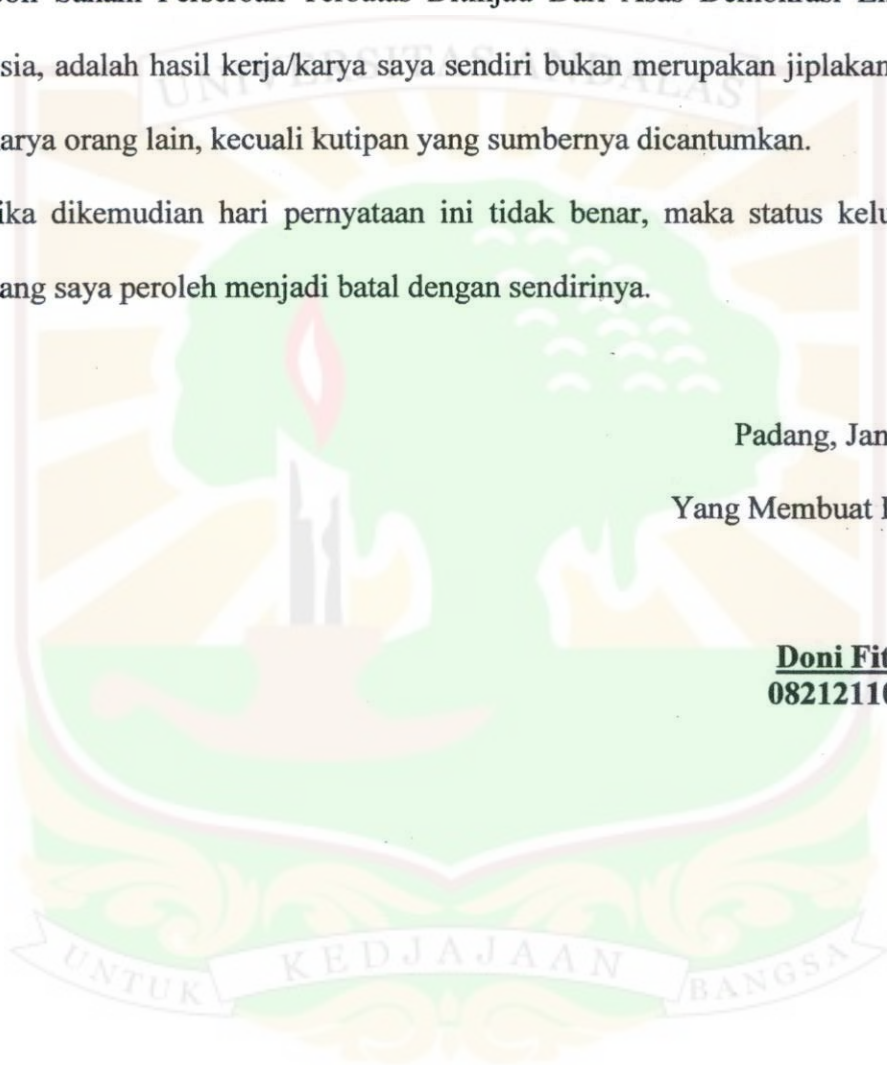
Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Tesis yang saya tulis dengan judul: Monopoli Saham Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Asas Demokrasi Ekonomi Di Indonesia, adalah hasil kerja/karya saya sendiri bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan.

Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, Januari 2010

Yang Membuat Pernyataan

Doni Fitra
0821211057



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Penulis masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Serta selawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas pencerahan iman yang diberikan kepada kita semua.

Penulisan tesis ini dengan judul **“Monopoli Saham Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Asas Demokrasi Ekonomi Di Indonesia”** dapat terwujud dengan dukungan dan peranan dari berbagai pihak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua Orang tua (Idris dan Enni Roswati) yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan program megister hukum. Kemudian ucapan terimakasih di sampai kepada Komisi Pembimbing yakni Ibu Dr. Yulfasni, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Ulfanora, S.H., M.H. atas bimbingan dan arahnya dalam penulisan tesis ini. Selain itu tidak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Direktur Pascasarjana dan Assisten Direktur Pascasarjana Universitas Andalas Padang.
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, yaitu Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.

3. Para Dosen Penguji pada Seminar Proposal dan Seminar Hasil serta Ujian Akhir, yakni Bapak Prof. Dr. Teguh Sulistia, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., Bapak Yoserwan, S.H., M.H., LLM dan Bapak Tasman, S.H., M.H., atas semua masukan dan saran-saran serta arahannya dalam perbaikan penulisan mulai dari proposal, hasil penelitian dilanjutkan dengan penulisan tesis sehingga penyempurnaan tesis ini.
4. Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang, terima kasih atas sumbangsih ilmu yang sangat berguna bagi Penulis dan Insya Allah akan Penulis amalkan pada kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat.
5. Para pegawai Akademik Pascasarjana Universitas Andalas Padang, atas bantuannya pada Penulis selama perkuliahan hingga selesai penulisan tesis ini.
6. Semua sahabat sesama mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas Padang, yang telah banyak memberi bantuan dan berbagai kemudahan dari awal perkuliahan hingga saat ini, semoga kita selalu dalam kebersamaan yang indah.

Dalam penulisan Tesis ini Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun di masa yang akan datang. Harapan Penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa, sebagai manusia yang selalu mempunyai kekurangan, Penulis haturkan

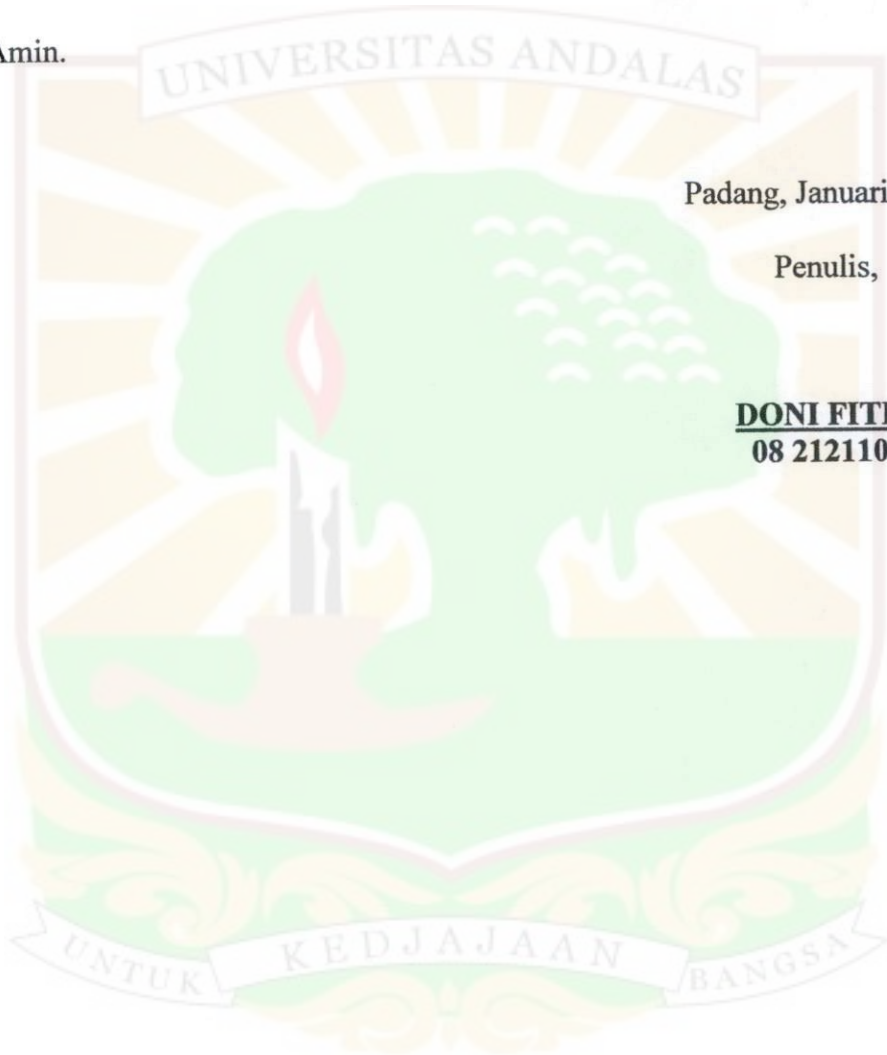
mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini. Semoga semua itu mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Padang, Januari 2010

Penulis,

DONI FITRA
08 21211057



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penulisan	12
D. Manfaat Penulisan	13
E. Kerangka Teori dan Konseptual	13
1. Kerangka Teori.....	13
a. Teori Campur Tangan Negara (Teori Campuran)	13
b. Teori Check and Balance.....	15
c. Teori Pendirian Perseroan.....	17
2. Kerangka Konseptual	20
a. Monopoli	20
b. Monopoli Saham	25
c. Praktek Monopoli	26
d. Persaingan Usaha Tidak Sehat	28
e. Saham	28
f. Demokrasi Ekonomi	30
g. Holding Company dan Konglomerat	32

F. Metode Penelitian	34
1. Tipe dan Pendekatan Penelitian	35
2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum	36
3. Alat Pengumpul Bahan Hukum	37
4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	38

BAB II PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA DALAM

PENGATURAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS SWASTA.....39

A. Embrio Pemikiran Demokrasi Ekonomi Indonesia.....	39
B. Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi Indonesia	42
C. Prinsip Demokrasi Ekonomi Indonesia Dalam Pengaturan Saham	51

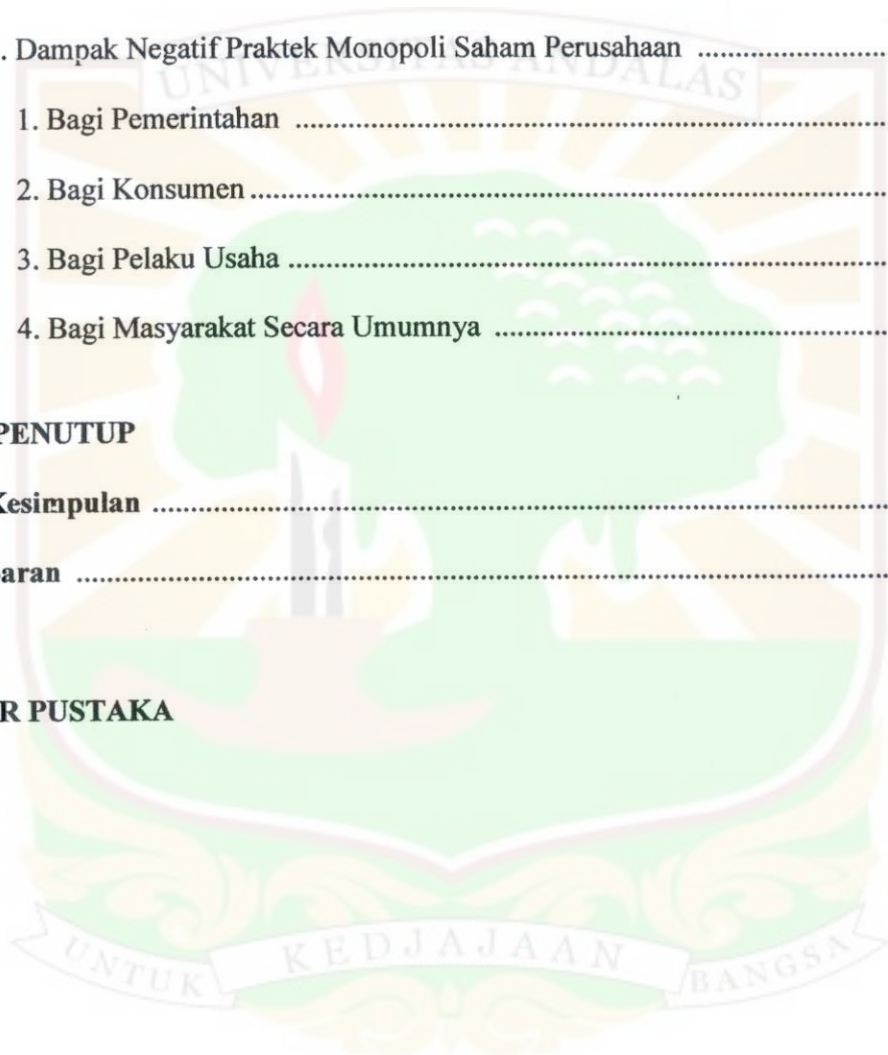
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA

PRAKTEK MONOPOLI SAHAM PERSEROAN TERBATAS

SWASTA68

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Praktek Monopoli Saham Perseroan Terbatas Swasta	68
1. Faktor Undang-Undang	68
a. Prinsip Perseroan	68
b. Perjanjian Pendirian Perseroan	70
c. Akuisisi Saham	74
d. Ukuran Monopoli Saham	79
2. Faktor Kontrol Penegak Hukum	88
a. Pengertian Kontrol	88
b. KPPU Sebagai Alat Negara Yang Mengontrol Kegiatan Usaha	89
c. Kontrol KPPU Pasif	95

3. Faktor Kultural	101
a. Sifat Kerukunan	101
b. Perusahaan Keluarga	104
4. Faktor Luar Negeri	107
a. Globalisasi	107
b. Perdagangan Bebas	108
B. Dampak Negatif Praktek Monopoli Saham Perusahaan	112
1. Bagi Pemerintahan	112
2. Bagi Konsumen	113
3. Bagi Pelaku Usaha	114
4. Bagi Masyarakat Secara Umumnya	114
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
 DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Skema Penguasa Demokrasi Ekonomi	41
Gambar 2: Dasar Demokrasi Indonesia	44
Gambar 3: Piramida Strata Pemegang Saham Perseroan Terbatas	61
Gambar 4: Monopoli Saham	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Ultimate Kontrol of Publicly Traded Companies in Selected

Countries 106



Monopoli Saham Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Asas Demokrasi Ekonomi Di Indonesia

Tesis S2 Oleh Doni Fitra

Pembimbing: 1. Dr. Yulfasni, S.H., M.H., 2. Hj. Ulfanora, S.H., M.H

ABSTRAK

Sifat manusia jelek, diantaranya menurut Thomas Hobbes adalah manusia dikuasai oleh nafsu untuk kepentingan diri sendiri. Sifat jelek manusia tersebut dapat dilihat antara lain dalam perniagaan (perdagangan) yang menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil-kecilnya atau sebaliknya, dengan menggunakan modal (*capital*) yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna menggusur para pesaing yang ada. Itulah sebabnya para pelaku usaha cenderung melakukan hal-hal yang bersifat antipersaingan dalam menjalankan usahanya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karena itu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti, yakni: a) apakah pengaturan saham perusahaan di Indonesia sudah sesuai dengan asas demokrasi ekonomi, b) faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya praktek monopoli saham perusahaan dan apa dampak negatifnya. Dalam penulisan tesis ini, penelitian yang dilakukan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Pengaturan saham perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan asas demokrasi ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b) faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya praktek monopoli saham perusahaan, digolongkan dalam tiga kelompok. faktor undang-undang, faktor kontrol penegak hukum yang lemah, faktor Kultural yang negatif, faktor luar negeri. Praktek monopoli saham perusahaan yang dilakukan oleh pelaku usaha membawa dampak negatif yang bersifat multidimensi. Artinya, dengan adanya praktek monopoli saham banyak aspek kehidupan yang akan terganggu seperti terganggunya kinerja pemerintah, sengsaranya para konsumen, tak berdayanya pelaku usaha yang lain (lemah), dan terjadi krisis sosial dalam masyarakat dalam bentuk besarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan: a) amandemen Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, b) supaya pemerintah meningkatkan perannya (ikut campur) dalam perekonomian dengan jalan memaksimalkan kinerja dari KPPU.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sifat manusia yang sangat jelek, diantaranya menurut Thomas Hobbes sejak zaman purbakala adalah bahwa manusia dikuasai oleh nafsu untuk memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Hal ini menyebabkan manusia merupakan srigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*).¹ Hal senada juga diungkapkan oleh Adam Smith, yang menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat yang serakah.² Melihat sifat jelek manusia tersebut dalam perkembangannya manusia mulai menyadari perlu adanya suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk melindungi hidup manusia supaya terciptanya perdamaian. Cara untuk menciptakan perdamaian tersebut adalah dengan menciptakan suatu aturan bersama.

Sifat jelek manusia tersebut dapat dilihat antara lain dari bagaimana ia melakukan perniagaan (perdagangan) yang menginginkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil-kecilnya atau sebaliknya, dengan menggunakan modal (*capital*) yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan guna mengusur para pesaing yang ada. Manifestasi dari sifat serakah tersebut dalam praktek bisnis terwujud dengan sedapat mungkin menghindari munculnya pesaing baru, karena munculnya pesaing atau rival dalam berusaha akan menurunkan tingkat keuntungan. Hal tersebut dapat terjadi karena keputusan tentang kualitas, kuantitas, dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tapi juga dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh para pesaingnya. Itulah sebabnya para pelaku usaha

¹ Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, hal 65-66

² Deliarnov. 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet III, hal 30

cenderung melakukan hal-hal yang bersifat antipersaingan dalam menjalankan usahanya.³

Monopoli merupakan aplikasi dari sifat antipersaingan di atas. Monopoli dapat dilakukan secara sendiri atau bekerjasama dengan para pelaku usaha lainnya. Setelah para pesaing tersingkir dari percaturan bisnis maka dengan sesukanya pelaku usaha (yang menang) tersebut dapat melakukan kontrol harga. Konsumen disisi lain sangat dirugikan, karena tidak lagi memiliki alternatif lain pada saat akan membeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas yang andal (prima) dan harga yang wajar atau murah.

Dunia usaha berperan penting guna berjalan dan majunya suatu Negara. Oleh karena itu dunia usaha tidak dapat berdiri sendiri, banyak aspek yang turut terlibat didalamnya baik langsung maupun tidak langsung seperti hukum, ekonomi dan politik. Keterkaitan yang paling berpengaruh bagi dunia usaha adalah hukum. Namun kadangkala hukum yang dilahirkan dari rahim legislasi tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, karena kurangnya pemahaman atas hukum yang mengatur dan hukum yang membangun⁴ Akibatnya dunia usaha dikesampingkan sehingga dalam melaksanakan usaha memerlukan waktu yang lama dalam pengurusannya. Hal inilah yang menghambat perkembangan dari dunia usaha tersebut.

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi pada era pemerintah Orde Baru yang memilih strategi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dalam arti berupaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pertumbuhan yang tinggi diasumsikan bahwa kalau pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, berarti upaya pembangunan ekonomi

³ Jhony Ibrahim. 2007. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implementasi Penerapannya di Indonesia*. Cet II, Malang: Bayumedia Publishing, hal 44

⁴ Lihat Charles Himawan Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi dan Sunayati Hartono, 1974. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Alumni.

tersebut berhasil. Keberhasilan itu bisanya ditandai dengan tingginya pendapatan nasional dan pendapatan penduduk rata-rata (*income per capita*).⁵

Masih pada Orde Baru, pemerintah memberikan peran yang lebih besar kepada swasta besar untuk melaksanakan strategi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), seperti pemberian kredit, keringanan pajak dan fasilitas lainnya. Tindakan pemerintah tersebut mengakibatkan usaha swasta besar berkembang dengan pesat dan bahkan telah melahirkan perusahaan raksasa atau pengusaha-pengusaha besar (konglomerat) yang berpengaruh pada perekonomian nasional. Sebaliknya perusahaan kecil dan menengah sangat sulit untuk memperoleh kredit perbankan atau fasilitas lainnya.⁶ Inilah kekeliruan atau kemunafikan pemerintah Orde Baru, yang tidak konsekuen dalam menjalankan amanat Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sementara dalam konsensus Nasional pemerintah Orde Baru gembur-gembur akan melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.

Berbicara mengenai monopoli, kita tidak dapat melepaskan perhatian dengan gejala berkembangnya konglomerasi yang banyak menimbulkan reaksi dari kalangan masyarakat dan para ahli hukum. Kita perlu bercermin dari kejadian di Amerika Serikat mengenai praktek monopoli. Pada tahun 1966, Art Buchwald menunjukkan perkembangan konglomerasi dinegerinya dengan amat canggih. Karena merger yang terus-menerus, dalam beberapa tahun, di Amerika cuma tertinggal dua perusahaan raksasa. Di barat Sungai Mississippi, berkuasa Samson Securities, sementara di sebelah timurnya Delilah Co.⁷

⁵ Sjahrir. 1991. *Analisis Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia, hal 176

⁶ Kwik Kian Gie. 1996. *Praktek Bisnis dan Orientasi ekonomi Indonesia*. Bandung: Bitra Aditya Bakti, hal 202

⁷ Zaim Saidi. 1996. *Konglomerat Samson-Delillah: Menyingkap Kejahatan Perusahaan*. Bandung: Mizan, hal 163

Undang-Undang antimonopoli Amerika pertama lahir pada 1890 (*Sherman Act*). Praktek persekongkolan dagang, penjataan pangsa dan daerah pasaran atau kesepakatan harga di antara pesaing, dilarang dan banyak tercegah. Tapi, gelombang merger justru makin membesar. Antara tahun 1989-1992, misalnya, rata-rata setahun terjadi 531 konsolidasi antar perusahaan, padahal tiga tahun sebelumnya cuma 46 kali. Maka, undang-undang itu terus diperketat.

Pada tahun 1914, dilahirkanlah *Clayton Act*, yang melarang penguasaan saham yang mengarah pada monopoli. Mulai 1950, lewat *Celler-Kefauver Act*, larang itu dipertegas, juga pada penguasaan aset. Tapi dasar konglomerat, memang sulit diatur laju konglomerasi tidak makin berkurang. Sejak 1963, sekitar 65% dari kasus yang ditangani Divisi Antimonopoli, Depkeh AS, adalah pelanggaran terhadap perangkat *antitrust* ini. Penguasaan pangsa pasar oleh 500 perusahaan terbesar versi *Fortune* pun dari waktu ke waktu terus membesar. Makanya, pada 1979, senator Edward Kennedy mengajukan *bill* baru untuk mengharamkan segala bentuk merger bagi mereka.⁸

Namun, bagaimanakah cara orang Amerika mengukur terjadinya suatu monopoli? Charles E. Mueller, seorang jaksa-ekonomi dari Washington—dengan dasar telaah ada 25 kasus—mengemukakan satu indikator yang menarik. Katanya, keadaan akan efektif termonopoli, bila empat perusahaan terbesar suatu produk telah menguasai 50% atau lebih pangsa pasar yang tersedia. Oleh para pejabat kantor Divisi Antimonopoli AS, angka ini kemudian dipakai sebagai indeks persekongkolan (*collusion index*). Konon, indeks ini lumayan akurat. Dengan indeks empat perusahaan 50% ini, sekitar 40% sektor industri di Amerika, nyatanya telah terkonsentrasi. Hal itu tidak saja terjadi pada sektor besar seperti kapal terbang, baja,

⁸ *Ibid*, hal 164

atau mobil, tapi juga pada industri silet, kertas tisu, bahkan permen karet, dengan rata-rata indeks persekongkolan antara 72% dan 98%. Lantas, apa salahnya? Dalam bukunya, *corporate crime*, Marshal B. Clinard dan Peter C. Yeager juga menunjukkan, bahwa pelanggaran atas *antitrust law* di AS, tidak saja menyebabkan inflasi. Pelanggaran itu juga menyebabkab infisiensi, menurunkan tingkat penyerapan tenaga kerja, dan menghambat inovasi.⁹

Disisi lain, bagi pemerintah dampak monopoli adalah berkurangnya jumlah wajib pajak karena dari pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan yang mati akibat kalah bersaing dengan pelaku monopoli. Sehingga dapat mempengaruhi kredibilitas pemerintah atau Negara karena pemerintah tidak dapat menata pengaturan dunia usaha secara adil.¹⁰

Lantas, bagaimana di Indonesia? Hasil penelitian pada tahun 1995 memperlihatkan bahwa Indonesia tingkat konsentrasi ekonomi tinggi di dunia yakni 56%. Bahkan untuk produk tertentu angka itu nyaris mutlak yakni, otomotif 95%, tepung terigu 100% dan mie instan 95%.¹¹ Hal itu berarti ekonomi atau pasar hanya dikuasai oleh satu atau beberapa pihak saja.

Kemudian fajar reformasi datang tahun 1998, dengan tumbangnya rezim Orde Baru yang pimpin Presiden Soeharto. Krisis ekonomi datang bak tsunami bagi bangsa Indonesia. Ironisnya, pelaku-pelaku bisnis kita, yaitu para konglomerat yang telah memperoleh perlakuan istimewa dari penguasa Orde Baru, ternyata tidak bertanggung jawab, dan tidak mau berbuat positif untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional yang sudah parah tersebut. Kondisi ini mengharuskan pemerintah

⁹ *Ibid*, hal 164-165

¹⁰ N.H.T. Siahaan, 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen dan Pertanggungjawaban Produk*, Jakarta: Panta Rei, hal 48

¹¹ Achmad Shauki, 1999. *Competition Problem in Indonesia*, Makalah Pada: Training In Competition Law and Policy, Elip Project, Denpasar, hal 3-6 di kutip dari Yoserwan. 2006. *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*. Padang: Andalas University Press, hal 3

mencari bantuan donor, baik bersifat kolektif maupun Negara per Negara termasuk IMF.

Melihat kondisi tersebut, masih terdapat hikmah yang dapat diambil pelajaran oleh para pemimpin bangsa ini. Dari rahim reformasi ini lahirlah pemikiran untuk menghilangkan praktek monopoli yang selama itu terjadi. Pemikiran anti monopoli tersebut dijewantahkan dalam Amanat Sidang Istimewa MPR-RI dalam Tap MPR-RI No.X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sub A (2)c sebagai berikut: "Membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan berbagai praktik monopoli serta mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi".

Pemikiran di atas tersebut, dilanjutkan oleh MPR hasil Pemilu tahun 1999 yang dituangkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Dalam Bab IV Arah Kebijakan, Sub B Bidang Ekonomi diamanatkan sebagai berikut:

- (1) Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan berbagai struktur pasar distortif yang merugikan masyarakat.
- (2) Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidak sempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.

Walaupun disadari TAP MPR tidak lagi sebagai landasan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi kita perlu mengambil ide-idenya tentang larangan praktek monopoli.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, lahir dari pemikiran-pemikiran di atas. Namun kelahiran undang-undang ini juga tidak terlepas dari intervensi asing. Dimana kita ketahui bahwa masa krisis tahun 1998 yang lalu, Indonesia memiliki *letter of intent* (LoI) dan *Supplementary Memorandum* dengan IMF yang ditanda tangani di Jakarta tanggal 15 Januari 1998. Dalam butir 31 Memorandum tersebut telah disepakati bahwa pemerintah akan melaksanakan berbagai pembaharuan struktural termasuk deregulasi berbagai kegiatan domestik yang bertujuan untuk mengubah ekonomi biaya tinggi Indonesia menjadi suatu ekonomi yang lebih terbuka, kompetitif dan efisien. Pembaruan-pembaruan struktural mensyaratkan bahwa berbagai rintangan artifisial yang selama ini telah menghambat persaingan domestik harus dihapus oleh pemerintah Indonesia.

Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) merupakan rambu-rambu dan batasan dalam menikmati kue pembangunan sehingga si besar tidak dengan seenaknya mengambil bagian si kecil. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 2 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Seperti perdagangan hanya dikuasai oleh keluarga dan kolega Presiden Soeharto, contohnya dalam pembuatan jalan tol diberikan kepada anak Soeharto (Mbak tutut) atau pengadaan barang impor diberikan kepada anak Soeharto yang lain (Tommy Soeharto atau Bambang).

Usaha-usaha kearah demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya menganjurkan agar perusahaan konglomerat mengalihkan sebagian kecil sahamnya kepada koperasi. Namun hal tersebut tampaknya kurang efektif karena lebih bersifat anjuran dan harapan.¹²

Masalah monopoli merupakan sesuatu hal yang unik. Landasan mengatakan suatu monopoli tidaklah ditentukan dari berapa kekuatan yang dimiliki sehingga disebut monopoli, melainkan berapa banyak hal yang tidak bisa dikuasai dan dilakukannya karena monopoli.¹³ Hal yang terpenting dan strategis dalam perusahaan - (yang dalam tulisan ini perusahaan tersebut penulis identikan dengan Perseroan Terbatas) - bila dikuasai dengan monopoli akan melahirkan banyak hal yang tidak bisa dikuasai dan dilakukan, hal tersebut adalah kepemilikan saham. Singkat kata kepemilikan saham menjadi penting dan strategis dalam perusahaan. Alasan kenapa saham merupakan hal terpenting dan strategis dalam perusahaan, karena:

a. Perseroan merupakan persekutuan modal

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUP, menyebutkan:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Melihat pasal di atas, mempertunjukan bahwa persekutuan modal tersebut dikristalisasi dalam bentuk saham-saham. Subjek hukum yang mempunyai

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Cet III. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal 6

¹³ Adrianus Meliala. 1995. *Menyingkap Kejahatan Krah Putih (White Collar Crime)*. Cet II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 137

saham (dominan) yang dapat mengatur Perseroan. Karena para pemegang saham memiliki berbagai hak yang diberikan oleh UUPT sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 52 ayat (1):

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividend an sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

- b. Saham mengantarkan pemegang saham ikut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Atas dasar pemikiran bahwa mereka yang mempunyai sahamlah yang dapat mengatur Perseroan, pemikiran tersebut dijewantahkan dalam bentuk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Karena RUPS lah yang nantinya yang akan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris kecuali untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya dilakukan oleh pendiri dan dibuatkan dalam akta pendirian.¹⁴ Singkat kata, para pemegang sahamlah¹⁵ yang dapat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- c. Kewenangan sentral dalam perseroan

RUPS merupakan salah satu organ dalam Perseroan. RUPS memiliki kewenangan yang lebih tinggi dari pada Direksi dan Komisaris. Karena Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS.¹⁶ Oleh karena itu Direksi dan Komisaris bekerja untuk seluruh pemegang saham guna memperoleh keuntungan.

¹⁴ Pasal 94 ayat (2) UUPT menyebutkan: "Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b", dan 111 UUPT menyatakan: Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b"

¹⁵ Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UUPT, menjelaskan bahwa "*Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain*".

¹⁶ Pasal 75 ayat (1) UUPT menyatakan, "RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar".

Bila kita berpikiran lebih radikal, terlihat bahwa Direksi dan Dewan Komisaris berpotensi hanya menjadi boneka bagi para kapitalis (pemegang modal/saham). Bila tidak melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pemegang saham/modal¹⁷ maka dapat diberhentikan. Secara teoritis, kecuali perintah itu melanggar undang-undang atau Anggaran Dasar barulah Direksi dapat melakukan perlawanan.

Di samping itu, salah satu kewenangan yang dapat menyebabkan terjadinya monopoli tersebut adalah kewenangan RUPS untuk menyetujui Penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan. Bila pemegang saham mayoritas setuju melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan maka terjadilah, meskipun ada perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, namun sebatas pembelian saham dengan harga yang wajar tidak menghentikan atau membatalkan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan tersebut¹⁸.

Oleh karena, bila kepemilikan saham tidak diatur dengan lebih baik maka monopoli akan tetap akan terjadi yang ujung-ujungnya melahirkan konglomerasi yang menjalankan kegiatan usaha yang tidak dapat dikontrol. Tentunya nanti dapat berakibat buruk bagi perekonomian negara. Hal senada juga disampaikan Menkominfo Muhammad Nuh dalam Rapat Kerja Depkominfo dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR di Jakarta, Senin, 15 September 2008, pemerintah segera awasi kepemilikan saham televisi swasta.¹⁹ Begitu juga pada beberapa tahun yang lalu pemerintah mengawasi kepemilikan saham di perusahaan telekomunikasi. Pemerintah melalui instrumen KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) melakukan pengawasan terhadap kepemilikan saham yang dilakukan oleh Tamasek

¹⁷ Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan, "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan".

¹⁸ Pasal 126 ayat (3) UUPT

¹⁹ <http://beritapendidikan.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=13&artid=833>, diakses tanggal 16 Maret 2009

secara tidak langsung terhadap dua perusahaan telekomunikasi nasional (Telkomsel dan Indosat) melalui anak perusahaannya yakni Seng Tel dan ICL.²⁰

Bila bidang-bidang tersebut dimonopoli, tentunya merugikan bagi konsumen di Indonesia. Seperti biaya telekomunikasi di Indonesia menjadi lebih mahal bila dibanding dengan Negara Asia lainnya, atau bila televisi telah dimonopoli maka pemberitaan dan acara akan seragam sehingga televisi sebagai alat pendidikan dan hiburan bagi masyarakat tidak akan terwujud. Hal tersebut sejalan dengan pendapat NHT Siahaan yang menyatakan bahwa akibat tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pelaku usaha cenderung tidak optimal mengontrol kualitas produknya, karena sebagai pelaku usaha dominan, produknya tetap menjadi bagian pasar yang dominan.²¹

Pemaparan di atas sejalan dengan fungsi dari hukum untuk mencapai ketertiban umum dan (yang pada gilirannya menciptakan keadaan yang kondusif untuk mencapai) keadilan²² guna mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan bahwa hukum mampu mengantarkan manusia mencapai apa yang ingin diwujudkan. Baik positif maupun negatif melalui sarana hukum yang diintrodusir oleh Roscoe Pound yang mengatakan hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of sosial engineering*).²³

Secara khusus terlihat bahwa hukum mengantarkan manusia mencapai kehidupan yang lebih baik. Hukum merupakan alat yang efektif untuk menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik. Hal tersebut dapat kita contohkan dalam hal sifat anti pesaingan dan menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa

²⁰ *Ibid*

²¹ N.H.T. Siahaan. *Op.cit*, hal 48

²² Budiono Kusumohamidjojo. 2004. *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo, hal 166

²³ Roscoe Pound, 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bharatara, hal, 7

mempedulikan orang lain dengan jalan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, jika tidak diatur oleh hukum maka kehidupan manusia tidak akan lebih baik.

Atas dasar latar belakang di ataslah penulis tertarik untuk membahas mengenai monopoli saham yang dilakukan oleh konglomerasi atau Perseroan Swasta. Agar apa yang dicita-citakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang demokrasi ekonomi dapat terwujud dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan saham perusahaan di Indonesia sudah sesuai dengan asas demokrasi ekonomi.
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan timbulnya praktek monopoli saham perusahaan dan apa dampak negatifnya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai monopoli saham yang dilakukan oleh Konglomerat atau Perseroan swasta. Secara rinci sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Memperoleh jawaban mengenai pengaturan saham di Indonesia sudah sesuai dengan asas demokrasi ekonomi Indonesia;
2. Memperoleh jawaban mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya praktek monopoli saham perusahaan dan mengetahui dampak negatifnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, Penulis mengharapkan tulisan ini dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu hukum sebagai lampu pencari (*search light*) menemukan kekurangan-kekurangan dalam hukum ekonomi. Sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat ditambal guna kesempurnaan kedepan hukum ekonomi.
- b. Secara praktis, penulis berharap tulisan ini bermanfaat bagi upaya pemulihan ekonomi Indonesia yang saat ini sedang sakit. Di samping itu, penulisan tulisan ini tentunya bermanfaat bagi penulis untuk dapat memenuhi prasyarat dalam memenuhi gelar megister hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Campur Tangan Negara (Teori Campuran)

Dalam tulisan ini menggunakan teori campur tangan Negara. Menurut Sri Redjeki Hartono, bahwa asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari tiga asas penting yang dibutuhkan dalam rangka pembinaan cita hukum dari asas-asas hukum nasional ditinjau dari aspek hukum dagang dan ekonomi. Dua asas lain adalah keseimbangan dan asas pengawasan publik.²⁴ Menurut beliau, kegiatan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat membutuhkan campur tangan Negara, mengingat tujuan dasar kegiatan ekonomi itu sendiri adalah untuk mencapai keuntungan. Sasaran tersebut mendorong terjadinya berbagai penyimpangan bahkan kecurangan yang dapat merugikan

²⁴ Sri Redjeki Hartono. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, hal 13

pihak-pihak tertentu, bahkan semua pihak. Oleh karena itu, beliau menegaskan bahwa campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi secara umum dalam rangka hubungan hukum yang terjadi tetap dalam batas-batas keseimbangan kepentingan umum semua pihak. Campur tangan negara dalam hal ini adalah dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen, sekaligus melindungi kepentingan negara dan kepentingan umum terhadap kepentingan perusahaan atau pribadi.²⁵

Pendapat Deliarnov, dalam perekonomian campuran sebagian interaksi ekonomi terjadi di pasar, tetapi di sana sini ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijaksanaannya. Misalnya untuk melindungi konsumen pemerintah menggunakan kebijaksanaan harga atas (*ceiling price*). Untuk melindungi golongan produsen pemerintah sering menggunakan kebijaksanaan harga dasar (*floor price*).²⁶

Kemudian Deliarnov mengungkapkan bahwa persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan, tetapi gerak-geriknya diawasi agar tidak sampai mengarah ke bentuk persaingan yang saling merugikan. Intinya campurtangan pemerintah dimaksudkan untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah terjadinya penumpukan atau konsentrasi ekonomi ke satu tangan (monopoli), mencegah dan mengatasi kalau terjadi krisis ekonomi.²⁷ Dapat dikatakan campur tangan Negara disini adalah peran Negara sebagai regulator (*stuurende*) dan *jury* (wasit) dengan memakai instrument hukum administrasi yang umum dan individual. Sedangkan menurut Geelhoed bentuk peran Negara adalah pengendalian berupa penetapan berbagai peraturan ekonomi makro dan penetapan

²⁵ *Ibid*, hal 15

²⁶ Deliarnova. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal

²⁷ *Ibid*

norma seletif lainnya serta yang masuk dalam kategori tindakan pemaksaan dalam suatu perselisihan para pihak.²⁸

Uraian di atas mengenai teori campur tangan Negara dapat kita tarik unsur-unsurnya, yaitu:

- 1) Negara Melakukan keseimbangan antara kepentingan produsen dengan konsumen (masyarakat umum);
- 2) Persaingan bebas diperbolehkan;
- 3) Campur tangan Negara dalam bentuk penetapan peraturan dan sebagai wasit bial terjadi perselisihan.

b. Teori Check and Balances

Menurut Wahyudi Kumorotomo dalam tulisannya berjudul memperbaiki mekanisme kawal dan imbang (*checks and balances*) dalam sistem pemerintahan daerah, mengungkapkan bahwa demokrasi dalam proses perumusan kebijakan akan terjamin apabila mekanisme kawal dan imbang (*checks and balances*) diantara tokoh dan lembaga perumus kebijakan publik berjalan dengan baik. Ada dua konsep pokok dalam mekanisme kawal dan imbang. Konsep pengawalan atau pengendalian (*checks*) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, di mana unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Sedangkan penyeimbangan kekuasaan (*balances*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga penguasa tersebut dalam proses

²⁸ Gunarto Suhardi. 2002. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal 8

perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak.²⁹

Teori kawal dan imbang (*check and balance*) yang dikemukakan di atas, penulis bawaan dalam kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan eksekutif (pemerintah). Pemerintah memberikan kebebasan kepada individu (termasuk perusahaan) untuk melakukan kegiatan perdagangan (perniagaan) asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak membahayakan perkenomian Negara. Hal ini sejalan dengan doktrin Rousseau, yakni: “Anda bebas sebeb-bebasnya, tetapi pada saat kebebasan Anda itu melanggar dan mengurangi kebebasan orang lain saat itulah Anda harus berhenti atau dikoreksi.”³⁰

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu (termasuk perusahaan) tersebut kemudian selalu dikawal supaya tidak terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan membahayakan perekonomian Negara. Bila pemerintah berpendapat telah terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan membahayakan perekonomian Negara dalam kegiatan perdagangan (perniagaan) pemerintah akan mengimbangi tindakan tersebut dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu yang dikawal pemerintah dalam ekonomi (perdagangan) adalah supaya tidak terjadi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dibentuknya badan yang khusus untuk mengawasi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yakni KPPU (Komisi Pengawas

²⁹ Wahyudi Kumorotomo, <http://www.google.com/mechanisme-kawal-dan-imbang-dalam-pemerintahan-daerah.pdf>, diakses tanggal 10 Mei 2009

³⁰ Christianto Wibisono. 1989. *Sepak Terjang Konglomerat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 22

Persaingan Usaha) merupakan bentuk pengejawantahan teori kawal dan imbang (*check and balance*) tersebut.

Uraian di atas mengenai teori *check and balances*, dapat ditarik unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) kebebasan berdagang;
- 2) Peraturan sebagai pengawal kebebasan;
- 3) Koreksi bila bertentangan oleh Peraturan oleh lembaga pemerintah
- 4) Sanksi alat penyeimbang.

c. Teori Pendirian Perseroan

Untuk memahami mengenai terjadinya monopoli saham, perlu rasanya untuk memaparkan mengenai teori pendirian perseroan. Memahami teori pendirian perseroan akan mempertajam analisis mengenai monopoli saham itu sendiri. Adapun teori-teori mengenai pendirian perseroan adalah sebagai berikut:

1) *Contractual theories*³¹

Contractual theories dibagi lagi kedalam dua bagian, yakni:

a) *Legal contractualism*

Berdasarkan *legal contractualism theory*, perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Di Indonesia hal ini tercermin pada Pasal 1 butir 1 UUPT yang menyatakan, bahwa: "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan

³¹ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana, hal 18

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,...". Rasio dari *contractual theories* adalah untuk membatasi tanggung jawab sosial dan menciptakan entitas yang sulit dipengaruhi oleh Negara, karena keengganan digunakannya perusahaan sebagai alat Negara.³²

b) *Economic contractualism*

Analisis ekonomi dimulai dari perspektif bahwa berdirinya perseroan adalah inisiatif dari para pemegang saham, bukan datang dari keinginan Negara. Keterlibatan Negara, melalui putusan pengadilan berdasarkan konstitusi, dilihat sebagai upaya memaksa bagi pemegang saham dan adanya sejumlah kewajiban yang ditujukan bagi direksi karena kepentingan pribadi direksi dapat merugikan para pemegang saham.³³

2) *Communitaire theories*

Teori ini melihat hadirnya suatu perusahaan bukan karena pemberian Negara semata, tetapi dibuat sebagai alat yang berguna bagi kepentingan Negara. Teori ini mulai dengan posisi yang berseberangan dengan kepentingan individual dalam *contractual theory*. Bentuk perusahaan dalam teori ini dikenal dalam Negara-negara yang menganut paham komunis maupun fasis seperti di Italia. Standar kegunaan suatu perusahaan bukan pada dicapainya kesejahteraan individual, tetapi mengusahakan agar masyarakat memiliki kesadaran tentang pentingnya komunitas untuk menghargai kelebihan individual dan mencapai kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.³⁴

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, hal 20-21

³⁴ *Ibid*, hal 22

Konsekuensinya perusahaan tidak diidentikan dengan aktivitas yang sifatnya komersial, karena telah menjadi alat politik. Akibatnya, tujuan komersial hilang. Perusahaan harus memiliki kesadaran sosial.³⁵

3) *Concession theories*

Teori ini dalam bentuk sederhana melihat kehadiran dan operasi perusahaan sebagai pemberian oleh Negara. Yang menjamin kemampuan berusaha dengan menggunakan perusahaan sebagai alat. Hal yang berlawanan antara teori ini dengan ide dari teori *communitaire* adalah teori *concession* menerima adanya campur tangan pemerintah hanya untuk memastikan struktur *corporate governance* berjalan secara adil dan demokratis.³⁶

Teori ini menentang gagasan bahwa perusahaan harus memiliki tujuan yang dapat mencerminkan aspirasi sosial suatu Negara. Hobbes mengategorikan perusahaan sebagai badan politik karena mendapat status dari keputusan pemerintah.³⁷

Dari ketiga teori mengenai pendirian perseroan, dalam membahas tesis ini digunakan *contractual theories* dalam melakukan analisis nantinya. Alasan digunakan *contractual theories* sebagai landasan teori adalah karena di dalam Pasal butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mana perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Menurut penulis pada hakikatnya secara implisit maupun eksplisit Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menganut teori ini.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*, hal 23

³⁷ *Ibid*

2. Kerangka Konseptual

a. Monopoli

Sebelum membicarakan mengenai monopoli, perlu dipaparkan mengenai persaingan sempurna. Karena dengan mengetahui konsep persaingan sempurna kita akan dapat memahami apa yang dimaksud dengan monopoli. Dikatakan bersaing sempurna jika (1) terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli komoditi, sedemikian rupa sehingga tindakan seorang individu tidak dapat mempengaruhi harga komoditi tersebut; (2) produk dari seluruh perusahaan dalam pasar adalah homogen; (3) terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna; dan (4) konsumen, pemilik sumber daya dan perusahaan dalam pasar mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga-harga dan biaya-biaya yang sekarang dan yang akan datang.³⁸

Monopoli dalam Pasal 1 ayat (1) UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat didefenisikan sebagai berikut: "Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha". Melihat definisi ini tidak jelas sampai di mana batas penguasaan suatu pasar atau apa yang dimaksud dengan menguasai. Definisi monopoli tidak akan dapat dipahami lebih jelas jika tidak dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lebih lanjut dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk itu perlu dikaitkan dengan Pasal 17. Ketentuan Pasal 17 menentukan tiga hal alternatif yang menjadi penentu dari pengertian monopoli, yakni: produk yang bersangkutan belum memiliki substitusinya; pelaku usaha lain menjadi tidak dapat memasuki persaingan usaha atas produk yang sama; satu pelaku usaha atau sekelompok

³⁸ Dominick Salvatore. 1995. *Teori MikroEkonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga, hal 245

pelaku usaha mendominasi lebih dari 50 persen pangsa pasar dari sejenis produk tertentu.

Disimpulkan bahwa monopoli menurut UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diartikan sebagai penguasaan suatu pasar atas keadaan-keadaan di mana suatu produk tertentu yang belum ada substitusinya atau pelaku usaha lain menjadi tidak dapat memasuki persaingan usaha, ataupun suatu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha mendominasi pangsa pasar dari sejenis produk tertentu lebih dari 50 persen.

Sebagai bahan perbandingan pengertian monopoli, berikut ini kemukakan pengertian monopoli menurut UNTAD Model Law dan menurut *Black's Law Dictionary*. Dalam UNTAD Model Law, monopoli dikaitkan dengan kegiatan yang mencakup penyalahgunaan atau akuisisi dan penyalahgunaan suatu posisi dominan kekuasaan pasar. Disebutkan demikian:

A prohibition on acts or behavior involving an abuse or acquisition and abuse of a dominant position of market power:

1. *Where an enterprise, either by itself or action together with a few other enterprise, is in a position to kontrol a releant market for a particular good or service, or group of goods or service;*
2. *Where the acts or behavior of a dominant enterprise limit access to a relevant market or otherwise unduly restrain competition, having or being likely to have advese effect on trade or economic development.*

Tulisan tersebut dapat diterjemahkan sebagai sebuah larangan di dalam undang-undang atau kebiasaan yang meliputi sebuah penyalahgunaan atau tambahan dan penyalahgunaan dari sebuah posisi dominant dari kekuatan pasar :

1. Apabila sebuah perusahaan, baik oleh perusahaan itu sendiri atau tindakan bersama dengan beberapa perusahaan lain, dalam satu posisi untuk mengontrol sebuah pasar yang relevan untuk barang dan jasa khusus, atau kumpulan barang-barang atau jasa

2. Apabila undang-undang atau kebiasaan dari perusahaan yang dominant membatasi akses kepada pada pasar yang relevan atau sebaliknya pengendalian kompetisi yang keterlaluan, memiliki atau seolah-olah memiliki efek yang merugikan di dalam perdagangan atau perkembangan ekonomi.

Pengertian yang terkandung UNTAD Model Law ini pada dasarnya memiliki prinsip sama dengan monopoli dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni pelaku usaha baik sendiri atau bersama-sama yang menguasai suatu produk atau sekelompok produk tertentu. Batasnya dikaitkan pula kepada kegiatan atau perilaku pelaku usaha yang secara dominan membatasi akses ke pasar atau menghambat persaingan dengan cara-cara tidak wajar, yang akibatnya mempengaruhi perkembangan ekonomi/bisnis.

Dalam *Black's Law Dictionary*, mengartikan monopoli sebagai:

*"a privilege or peculiar advantage vested in one or more person or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or kontrol the sale of the whole supply of a particular commodity"*³⁹

Tulisan di atas dapat diterjemahkan bahwa sebuah hak istimewa atau manfaat-manfaat yang khas yang diberikan kepada satu atau beberapa orang atau perusahaan, terdiri atas hak eksklusif (atau kekuatan) untuk melanjutkan bisnis khusus atau perdagangan, membuat sebuah pasal khusus, atau mengontrol penjualan keseluruhan suplai dari komoditas khusus. Jika ditilik dari dua definisi di atas, terlihatlah perbedaan, definisi yang diberikan oleh UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli itu mengacu pada penguasaan pasar, sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, monopoli mengacu

³⁹ Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition, St. Paul, Minn, West Publishing Co. hal 1007

pada suatu hak istimewa (*privilege*) yang dapat menghilangkan adanya persaingan bebas yang akan berakibat langsung pada penguasaan pasar.

Selanjutnya dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan "*Monopoly as prohibited by Section 2 of the Sherman Antitrust Act, has two element:*

- 1) *Possession of monopoly power in relevant market;*
- 2) *Willful acquisition or maintenance of thar power*".

Tulisan di atas dapat diterjemahkan bahwa monopoli sebagaimana dilarang di dalam Seksi 2 dari *Sherman Antitrust Act*, memiliki 2 elemen :

1. kepemilikan dari kekuatan monopoli di dalam pasar yang relevan
2. tambahan yang disengaja atau pengembangan dari kekuatan tersebut

Dalam hal ini jelas bahwa monopoli yang dilarang oleh Section 2 dari *Sherman Antitrust Act* adalah monopoli yang bertujuan untuk menghilangkan kemampuan untuk melakukan persaingan, dan atau untuk tetap mempertahankannya. Hal ini memberikan konsekuensi dimungkinkan dan diperkenankannya monopoli yang terjadi alamiah, tanpa adanya kehendak dari perilaku usaha tersebut untuk melakukan monopoli, *Section 2* dari *Sherman Act* memang lebih menekankan pada proses terjadinya monopolisasi dan bukan pada monopoli yang ada.

Eksistensi monopoli dalam kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan perekonomian dan masyarakat. Karena itu perlu dijelaskan masing-masing jenis monopoli tersebut, supaya masyarakat mengetahuinya.

Ada beberapa argument yang dapat dikemukakan sehubungan dengan jenis-jenis monopoli. Hal-hal tersebut antara lain meliputi hal-hal berikut ini:

- 1) Monopoli lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan usaha yang sehat (*monopoly by nature*). Monopoli bukanlah suatu perbuatan jahat bila diperoleh dengan mempertahankan posisi tersebut melalui kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang professional. Monopoli terjadi sebagai akibat dari suatu *superior skill*, yang salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh Negara, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha tertentu atas hasil riset dan pengembangan atas teknologi tertentu. Selain itu ada juga yang dikenal dengan istilah *trade secret*, yang meskipun tidak memperoleh eksklusifitas “pengakuan” oleh Negara, namun dengan teknologi “rahasia” nya mampu membuat suatu produk superior.
- 2) Monopoli terjadi karena pemberian Negara. Dalam artian monopoli terjadi karena memang dikehendaki undang-undang (*monopoly by law*). Di Indonesia hal ini sangat jelas dapat dilihat dari pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 51 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan BUMN.
- 3) Monopoli merupakan suatu *historical accident*. Dikatakan sebagai *historical accident* oleh karena monopoli tersebut terjadi karena tidak sengaja, dan berlangsung karena proses ilmiah, yang ditentukan oleh berbagai faktor terkait dimana monopoli tersebut terjadi. Dalam hal ini penilaian mengenai pasar bersangkutan yang memungkinkan terjadinya monopoli menjadi sangat relevan. Seperti monopoli yang dilakukan oleh orang Cina di Indonesia. Meskipun keturunan Cina di Indonesia 3-5% dari keseluruhan penduduk

Indonesia, namun dominasi mereka dalam bisnis terbesar di hampir seluruh lapangan usaha.⁴⁰ Hal ini terjadi sudah sejak lama, dari zaman kolonial sampai sekarang.

- 4) Monopoli karena terbentuknya struktur pasar akibat perilaku dan sifat serakah manusia. Sifat-sifat dasar manusia yang menginginkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat dan dengan pengorbanan dan modal yang sekecil-kecilnya atau sebaliknya menggunakan modal yang sangat besar untuk memperoleh posisi dominan. Jelasnya jenis monopoli ini dilarang karena menghambat atau penyimpangan struktur pasar, pembagian pasar dan menyalah gunakan kekuatan pasar (*market power*) guna menyingkirkan para pesaing untuk keluar dari arena pasar.

b. Monopoli Saham

Monopoli saham dalam tulisan ini mengacu kepada kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama. Pasal 27 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;

⁴⁰ Sjahrir. 1992. *Refleksi Pembangunan Ekonomi Indonesia 1968-1992*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 74

- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Sehingga dari praktek kepemilikan saham mayoritas inilah terjadi yang namanya monopoli. Tindakan tersebut diistilahkan dengan nama monopoli saham.

Penulis sepandangan dengan makna monopoli yang diutarakan oleh Adrianus Meliala, bahwa suatu monopoli tidaklah ditentukan dari berapa kekuatan yang dimiliki sehingga disebut monopoli, melainkan berapa banyak hal yang tidak bisa dikuasai dan dilakukannya karena monopoli.⁴¹ Karena dari monopoli saham ini banyak hal yang tidak bisa dilakukan, karena pemilik saham dengan RUPS nya telah mengambil kebijakan yang mempengaruhi harga barang dan jasa di pasar.

c. Praktek Monopoli

Praktek monopoli dalam Pasal 1 angka (2) UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan bahwa

Praktek monopoli yaitu suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Dari defenisi yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya ada 4 hal yang dapat kita kemukakan tentang praktek monopoli, yaitu:

- 1) Adanya pemusatan kekuatan ekonomi;
- 2) Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
- 3) Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
- 4) Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

⁴¹ Adrianus Meliala. *Op.cit.* hal 137

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha⁴² dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Satu hal yang menarik disini bahwa selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (sebagaimana didefinisikan), maka hal itu tidak dapat dikatakan telah terjadi suatu praktek monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang ini, meskipun monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi (dalam bentuk penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu). Jadi jelaslah bahwa monopoli itu sendiri tidak dilarang, yang dilarang adalah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pengertian di atas jelas dapat kita lihat bahwa salah satu prasyarat pokok dapat dikatakan telah terjadi suatu pemusatan kekuatan ekonomi adalah terjadinya penguasaan nyata dari pasar bersangkutan sehingga harga barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai penawaran dan permintaan, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut.

⁴² Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

d. Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 1 angka (6) UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan bahwa:

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Melihat pengertian persaingan usaha tidak sehat di atas, tergambar bahwa tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa ekonomi yang berdasarkan pada persaingan usaha, dengan asumsi bahwa melalui persaingan usaha yang sehat, para produsen akan berjuang untuk mencapai kepuasan konsumen melalui produk berkualitas, penciptaan harga yang murah dengan penggunaan sumber produksi yang sekecil mungkin. Artinya dengan persaingan usaha yang sehat nantinya akan bermuara kepada tujuan kesejahteraan konsumen. Yang mana akan membuat barang atau jasa yang dikehendaki oleh masyarakat harga produksi serendah, yang tentunya berimbas kepada harga jual yang murah.

e. Saham

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan beberapa pengertian saham, antara lain, dilihat dari sudut pandang ekonomis saham berarti surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar-kecilnya modal yang disetor; saham adalah hak yang dimiliki organ (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan.⁴³ Sedangkan dalam Kamus Khusus Pasar Modal dan Uang dijelaskan, saham adalah surat bukti

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, hal 861

pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetorkan.⁴⁴

Menurut Rachmat Soemitro, Saham ialah suatu tanda ikut serta dalam modal perseroan. Surat saham sering juga disebut juga surat andil, surat peserta atau surat sero. Pada tiap-tiap saham disebut harga nominalnya. Tidak diperkenankan pengeluaran saham-saham tanpa disebut harga nominalnya. Di beberapa Negara diperkenankan pengeluaran saham-saham yang tidak disebut harga nominalnya (*non par value share*). Saham mempunyai arti penting, karena memberi hak serta kewajiban kepada para pemegang saham, misalnya hak menghadiri rapat pemegang sahamnya, hak mengeluarkan suara, hak atas bagian keuntungan, hak memeriksa buku-buku Perseroan, dan sebagainya.⁴⁵

Pengertian yang hampir sama diungkapkan oleh R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, yang menyebutkan bahwa saham adalah istilah abstrak yang menunjukkan adanya suatu hak dan dapat diartikan sebagai suatu tanda keikutsertaan dalam modal Perseroan. Saham mempunyai arti penting, karena pemegangnya mempunyai hak dan kewajiban terhadap Perseroan misalnya:

- 1) Menghadiri rapat pemegang saham;
- 2) Hak mengeluarkan suara;
- 3) Hak pembagian keuntungan dan pembagian sisa kekayaan Perseroan;
- 4) Memeriksa buku-buku Perseroan;

⁴⁴ Kamus Khusus Pasar Modal dan Uang. 1974. Jakarta. Departemen Keuangan RI- Badan Pelaksana Pasar Modal, hal 49

⁴⁵ Rachmat Soemitro. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: PT. Eresco, hal 26

5) Wajib menyeter kekurangannya dan sebagainya.⁴⁶

Rumusan secara yuridis mengenai saham dapat ditemukan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/32/Kep/Dir, tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit Kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit Dengan Anggunan Saham. Dalam Pasal 1 butir c disebutkan, saham adalah surat bukti pemilikan suatu perseroan terbatas, baik yang diperjualbelikan di Pasar Modal maupun yang tidak.

Saham dalam tulisan ini mengacu kepada saham pada perusahaan (perusahaan disini penulis identikan dengan Perseroan Terbatas). Penulis tidak membahas mengenai BUMN, walaupun BUMN juga memiliki bentuk Perseroan Terbatas. Saham yang dibahas dalam tulisan ini menyangkut saham pada perusahaan tertutup dan saham pada perusahaan terbuka.

f. Demokrasi Ekonomi

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan: "Perekonomian disusun sebagai **usaha bersama** berdasarkan atas **asas kekeluargaan**". Kemudian pada ayat (4) disebutkan,

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas **demokrasi ekonomi** dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Wujud dari perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

⁴⁶ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hal 56

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Defenisi demokrasi ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa itu demokrasi ekonomi perlu dipahami lebih konkrit tidak lagi sebatas ide. Namun penjabaran tersebut tidak ditemukan dalam undang-undang.

Namun walaupun demikian defenisi demokrasi ekonomi tersebut dapat ditemukan dalam Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Walaupun TAP MPR dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dijadikan dasar hukum. Namun demikian dipaparkannya TAP MPR RI tersebut sebagai dasar berpikir. Dalam TAP MPR RI tersebut dijabarkan bahwa dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
- b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

- c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Dengan demikian demokrasi ekonomi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwatak kesejahteraan sosial, yaitu kemakmuran bagi semua orang. Disamping itu Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas dasar bagi demokrasi ekonomi itu, negaralah yang mengambil tanggung jawab dan mengatur kemakmuran kearah yang merata. Sejalan dengan pemikiran demokrasi ekonomi di atas, Sritua Arief memberikan definisi tersendiri apa yang dinamakan demokrasi ekonomi. Sritua Arief mengatakan bahwa demokrasi ekonomi sebagai suatu situasi kehidupan ekonomi sosial dimana kalangan masyarakat luas ikut serta menjadi pelaku aktif dalam proses ekonomi dan dalam keikutsertaan ini memperoleh kesempatan untuk menikmati secara wajar manfaat-manfaat yang timbul dari proses ekonomi ini.⁴⁷ Oleh karena itu pemilikan saham secara mayoritas dalam perusahaan yang melakukan kegiatan yang sama dilarang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

g. Holding Company dan Konglomerat

Perusahaan holding sering juga disebut dengan *holding company*, *parent company*, atau *controlling company*. Munir Fuady mengartikan *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.⁴⁸

⁴⁷ Didik J. Rachbini. 1990. *Politik Pembangunan Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: LP3S, hal 133

⁴⁸ Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 84

Sedangkan menurut Winardi, *holding company* ialah perusahaan yang menguasai perusahaan lain. Seringkali orang mengatakan bahwa sebuah *holding company is a company which holds other companies*,⁴⁹ (holding company adalah sebuah perusahaan yang mana menguasai beberapa perusahaan yang lain). Selanjutnya menurut Komaruddin yang dimaksud dengan *holding company* ialah suatu badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha yang akan dipengaruhinya.⁵⁰

Lain hal dengan yang dimaksud dengan konglomerasi. Dalam *Black's Law Dictionary*, *conglomerate is a corporation that owns unrelated enterprises in a wide variety of industries*.⁵¹ Bila diartikan secara bebas kalimat tersebut, konglomerat adalah sebuah perusahaan (badan hukum) yang mempunyai usaha yang tidak berhubungan dalam sebuah usaha industri yang bermacam-macam. Artinya, konglomerasi merupakan perusahaan tunggal yang menguasai berbagai bidang industri.

Menurut Kwik Kian Gie, konglomerat adalah kumpulan *profit centers* yang dimiliki oleh satu orang atau satu perkongsian dari sekelompok kecil orang. Pada prinsipnya konglomerat merupakan hasil pengembangan perusahaan dengan berbagai diversifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Diversifikasi tersebut dilakukan dengan motif pembagian resiko antar perusahaan (*spread out*) dengan sasaran mencapai suatu tingkat efisiensi yang tinggi, yang akhirnya akan

⁴⁹ Winardi, 1996. *Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa. Inggris-Belanda-Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, hal. 188.

⁵⁰ Komaruddin, 1982, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*, Jakarta: Alumni, hal. 161

⁵¹ Bryan A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. United States of America: West Publishing Co. hal 297

bermuaara pada makin besarnya keuntungan yang didapat oleh perusahaan secara keseluruhan.⁵²

Dari pengertian *holding company* dan konglomerat di atas dapat disimpulkan bahwa *holding company* merupakan perusahaan (*rechtperson*) yang berusaha untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha guna untuk mempengaruhi pasar. Sedangkan konglomerat adalah orang (*naturlijk person*) yang berusaha untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha guna untuk mempengaruhi pasar. Namun jika di depan kata konglomerat terdapat kata perusahaan konglomerat maka konotasinya menjadi tidak sama lagi.

F. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh karena tujuan umum penelitian adalah memecahkan masalah, penggunaan metode yang tepat di dalam penelitian ditujukan untuk menghindari cara pemecahan masalah dan cara berpikir yang spekulatif dalam mencari kebenaran ilmu, menghindari cara pemecahan masalah atau cara bekerja yang sifat *trial and error* (percobaan dan kesalahan), dan meningkatkan sifat obyektifitas dalam menggali kebenaran pengetahuan.⁵³ Dalam kaitannya dengan hal itu, maka penelitian perlu menggunakan metode yang relevan. Metode penelitian dalam hal ini dapat dijabarkan dari aspek pendekatannya, metode dan alat pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

⁵² Kwik Kien Gie. *Sekali Lagi Apa itu Konglomerat*. Kompas, Rabu 22 November 1989 dalam tulisan Yulfasni. *Eksistensi Perusahaan Konglomerat Menurut Pasal 33 UUD 1945*. Jurnal Penelitian Andalas, No 14/September/Tahun VI/ 1993, hal 55

⁵³ Hadari Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, hal 39-40

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵⁴ Alasan penelitian hukum normatif disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bahwa penelitian terhadap data sekunder dimungkinkan untuk menarik generalisasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian, tidak terikat oleh suatu waktu dan tempat, penghematan tenaga dan biaya, dan punya ruang lingkup yang seluas-luasnya.

Penggunaan metode yuridis normatif bersifat kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai alasan sebagai berikut: *Pertama*, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep-konsep, dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada yang dikumpulkan. *Kedua*, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifir. *Ketiga*, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral (*holistic*).

Sementara itu penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*state approach*)⁵⁵ dan pendekatan analitis (*analytical approach*)⁵⁶. Pendekatan undang-undang sebagai upaya menganalisis bahan hukum yang ada. Sedangkan pendekatan analitis adalah

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 13-14

⁵⁵ Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet II. Malang: Bayumedia Publisng, hal 302

⁵⁶ *Ibid*, hal 310

upaya analisis tentang asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari tulisan.⁵⁷ Bahan hukum tersebut diklasifikasikan atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan karya ilmiah dari ahli hukum yang berpengauh (*deherseende leer*) yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti koran, majalah, makalah-

⁵⁷ Metode dokumentasi disebut juga dengan istilah teknik documenter atau studi documenter. Ade Saptomo. 2004. *Metode dan Jalan Dalam Bidang Ilmu Sosial*. Padang: Kopertis Wilayah X, hal 6-8

makalah dalam seminar dan symposium, kasus-kasus hukum, dan yurisprudensi.⁵⁸

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup:

- 1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. contohnya adalah misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.
- 2) Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan lainnya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.⁵⁹

3. Alat Pengumpul Bahan Hukum

Alat untuk mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari tulisan adalah pedoman dokumentasi yang membuat garis-garis besar kategori yang dicari.⁶⁰

Setelah garis-garis besar kategori yang dicari dibuat, bahan-bahan yang terkumpul dikelompokkan dan ditempatkan sesuai dengan kategori-kategori yang ada.

⁵⁸ Jhony Ibrahim. 2006. *Op.cit*, hal 296

⁵⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal 33

⁶⁰ *Ibid*. Pedoman studi kepustakaan menurut PM Hadjon beranjak dari rumusan masalah yang fokusnya kepada kartu. Kartu itu berguna untuk mengumpulkan setiap ide, usul atau argumentasi yang berasal dari studi kepustakaan. Ada tiga macam kartu untuk studi kepustakaan, yaitu kartu abstrak, kartu kutipan, dan kartu analisis (bisa saja tiga macam catatan tersebut dibuatkan satu kartu. Philipus M. Hadjon. *Merancang dan Menulis Hukum Normatif (teori dan filsafat)*, hal 6 (tidak diterbitkan).

4. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat kecenderungan dapat atau tidak saham menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam penentuan telah terjadinya suatu praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat secara tepat.

BAB II

PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA DALAM PENGATURAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS SWASTA

A. Embrio Pemikiran Demokrasi Ekonomi Indonesia

Demokrasi sangat diidentikan dengan politik dan ketatanegaraan. Namun dalam bidang ekonomi juga mengenal istilah demokrasi, yang dikenal dengan istilah demokrasi ekonomi. Jika demokrasi dibenarkan dalam pengurusan Negara, maka ia juga dibenarkan dalam mengurus usaha-usaha ekonomi.⁶¹

Lahirnya pemikiran demokrasi ekonomi Indonesia, tidak terlepas dari perjalanan panjang bangsa ini. Yang pada waktu yang lampau sebelum merdeka memiliki struktur ekonomi pantai dan perekonomian pedalaman⁶² serta perekonomian kolonial. Perekonomian pantai merupakan perekonomian niaga yang bercorak kapitalisme dini, sedangkan di pedalaman berlaku perekonomian yang bercorak ikatan adat.⁶³ Struktur ekonomi kolonial berorientasi, berpusat atau mengabdikan pada kepentingan Negara induk atau Negara penjajah.

Setelah merdeka struktur ekonomi pantai dan pedalaman serta kolonial kemudian berubah menjadi struktur ekonomi nasional. Struktur ekonomi nasional yang terbentuk tersebut berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun telah ada struktur ekonomi nasional tersebut namun struktur ekonomi yang telah ada sebelum Indonesia merdeka masih tetap ada dalam kegiatan masyarakat Indonesia.

⁶¹ Robert A. Dahl. 1992. *Demokrasi Ekonomi Sebuah Pengantar*. Terj. Ahmad Setiawan Abadi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal 96

⁶² A. Hanan Hardjasasmita. 1982. *Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia dan Perkembangannya Sampai Dengan Awal Periode 80an*. Bandung: CV Armico, hal 10

⁶³ *Ibid*

Perkembangan pemikiran demokrasi ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi dunia. Hal ini terjadi karena para pemuda Indonesia yang terpelajar di kirim oleh Pemerintah Hindia Belanda ke luar negeri untuk belajar. Setelah menyelesaikan pendidikannya di luar negeri, para pemuda tersebut berbaur dalam sistem pemerintahan dan berperan serta dalam pembentukan sistem ekonomi yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sistem demokrasi ekonomi Indonesia sangat besar dipengaruhi oleh para pelajar tersebut.

Pada akhir abad ke-18 sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari tiga pemikiran lainnya: sekularisme, liberalisme, dan Kapitalisme. Ketiganya muncul sebagai satu paket untuk melawan pemikiran-pemikiran lain yakni monarki absolut (otokrasi) dan teokrasi. Saat itu rakyat di 13 koloni Inggris di pantai timur Amerika serta Kekaisaran Prancis terbelah, ada yang pro raja dan gereja (dipimpin para bangsawan) dan kontra raja dan gereja (dipimpin para filosof dan kaum borjuis). Pihak pertama membela monarki absolut (kekuasaan raja) dan teokrasi (kekuasaan gereja). Mereka mengopinasikan teori kedaulatan Tuhan dan konsep raja sebagai manusia terpilih yang menjadi perpanjangan-Nya. Dengan teori ini posisi raja dan gereja yang sudah stabil selama ratusan tahun tidak digugat.

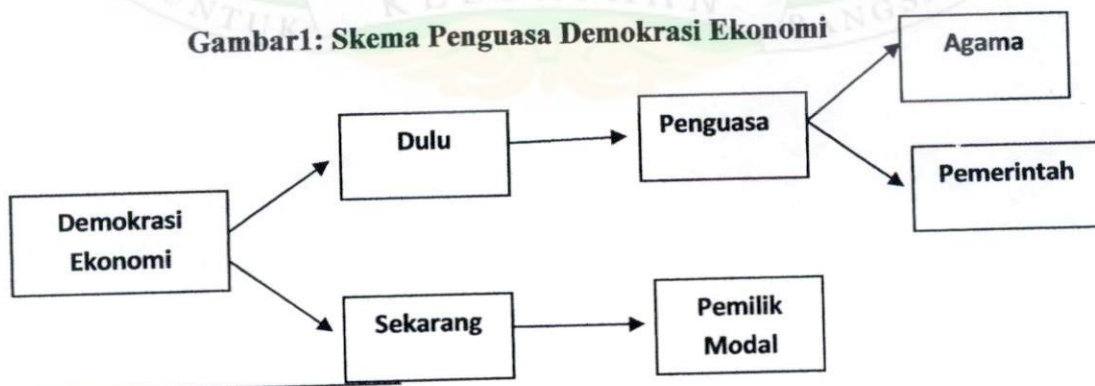
Sebaliknya, pihak kedua mengeluarkan empat teori yang berlawanan. Teori sekularisme menyatakan bahwa rakyat tidak perlu terikat pada aturan gereja dalam kehidupan publik. Selanjutnya liberalisme menegaskan pola pikir dan pola sikap rakyat hendaknya terserah rakyat sendiri. Kapitalisme menyatakan bahwa ekonomi hendaknya tidak didominasi kerajaan. Hendaknya rakyat (termasuk di dalamnya kaum borjuis) terlibat besar dalam ekonomi, dan pemerintah hanya sebagai wasit ekonomi saja. Adapun demokrasi menegaskan teori kedaulatan rakyat sebagai lawan dari teori kedaulatan Tuhan. Demokrasi menegaskan *Vox Populi Vox Dei*

(suara rakyat adalah suara tuhan). Tidak ada ketentuan Tuhan mengatur rakyat dalam kehidupan publik. Sebaliknya, suara publik itu sendirilah yang harus diakui sebagai pencerminan suara Tuhan.⁶⁴

Jelaslah, demokrasi berada dalam satu kesatuan dengan ketiga pemikiran lain. Dalam realitasnya, pada negara-negara yang berubah menjadi negara demokrasi berlangsung dua proses berikut: Pertama, dengan dipelopori para filosof, dengan sekularisme dan liberalismenya, kedaulatan rakyat berarti rakyat semakin jauh dari kedaulatan penguasa (otokrasi) dan kedaulatan gereja (teokrasi); kedaulatan rakyat berarti lawan dari kedaulatan nilai dan kedaulatan penguasa. Kedua, dengan melihat fakta bahwa rakyat yang paling kuat adalah kaum borjuis (kaum kapitalis, para pemilik modal) maka otomatis rakyat berada dalam kekuasaan kaum borjuis dengan demikian kedaulatan rakyat berarti kedaulatan pemilik modal (korporatokrasi). Alhasil, dengan demokrasi bukan kedaulatan rakyat yang diraih, tetapi rakyat berpindah dari kedaulatan nilai dan kedaulatan penguasa menuju kedaulatan pemilik modal; dari teokrasi dan otokrasi ke korporatokrasi.

Kalau kita telusuri berubahnya negara-negara di dunia menuju negara demokrasi, sejak akhir Abad XVIII M sampai sekarang, akan kita temui bahwa rakyat berpindah dari dominasi penguasa dan agama menuju dominasi pemegang modal. Di mana-mana negara demokrasi akan selalu didominasi para pemodal.

Gambar1: Skema Penguasa Demokrasi Ekonomi



⁶⁴ Soehino. 2000. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, hal 243

Melihat fenomena tersebut, Bapak bangsa (*funding father*), Mohammad Hatta, mengeluarkan ide mengenai demokrasi ekonomi Indonesia yang mempunyai cita-cita untuk masyarakat yang adil dan makmur. Ide Mohammad Hatta tersebut menitik beratkan kepada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Ide Mohammad Hatta tersebut dijadikan dasar negara yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kemudian ide Mohammad Hatta dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikembangkan dengan dilakukannya amandemen terhadap pasal tersebut menjadi empat ayat yang bunyinya:

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebutlah yang dijadikan acuan dalam membentuk perekonomian dan membuat aturan perundang-undangan dibidang ekonomi. Jiwa tersebut harus terpatrit dalam setiap kelahiran undang-undang dibidang ekonomi.

B. Prinsip-Prinsip Demokrasi Ekonomi Indonesia

Menurut Mohammad Hatta, prinsip ekonomi ialah dasar yang dikemukakan dalam ilmu ekonomi, sebagai pengatur segala tindakan ekonomi. Sebelum menjadi prinsip ekonomi dasar ini dikenal sebagai motif ekonomi. Motif ekonomi ialah

suatu kenyataan dalam masyarakat yang timbul sebagai akibat dari pertentangan antara keperluan hidup manusia yang banyaknya tidak terbatas dan alat pemuas keperluan hidup itu yang jumlah kuantitasnya tidak mencukupi. Prinsip ekonomi tak lain dari pada motif yang sengaja dirasionalisasi, ditujukan untuk mencapai hasil yang sedapat mungkin sebesar-besarnya.⁶⁵

Prinsip demokrasi ekonomi Indonesia tersebut mempunyai tujuan untuk kepetingan seluruh rakyat, untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum, seperti ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2004:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

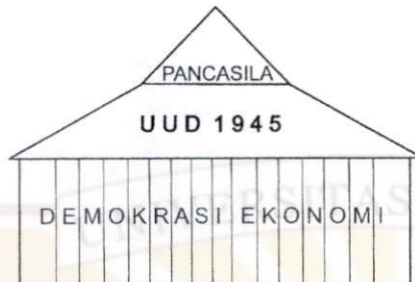
Dengan kata-kata yang ditegaskan di atas, tergambarlah bahwa tujuan Negara Indonesia terdiri dari tiga hal, yakni melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demokrasi ekonomi adalah suatu konsep ekonomi yang ditawarkan, berbasis pada independensi dan sekaligus dipendensi sistem-sistem ekonomi dan politik. Konsep ekonomi tersebut tentunya mempunyai prinsip-prinsip yang menjadi acuannya. Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi Indonesia dapat dilihat dalam Pancasila sebagai norma fundamental Negara (*staatsfundamentalnorn*) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan

⁶⁵ Mohammad Hatta, 1979. *Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis*, Jakarta: Mutiara, hal 55-56

dasar atau pokok Negara (*staatsgrundgesetz*).⁶⁶ Sebagaimana diilustrasikan seperti gambar berikut ini:

Gambar 2: Dasar Demokrasi Indonesia



Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibagi kedalam enam prinsip, yakni:

1. Asas Kekeluargaan

Von Savigny menekankan bahwa hukum tidak hanya tumbuh dari norma-norma pra hukum saja, melainkan mengikuti pertumbuhan dari etik sosial. Akibatnya, hukum sebagaimana dia menampilkan diri dalam pranata-pranata yang dipraktekkan oleh masyarakat, sebenarnya merupakan refleksi dari jiwa masyarakat tersebut.⁶⁷ Prinsip kekeluargaan merupakan refleksi dari jiwa masyarakat yang menginginkan suatu kesejahteraan bersama. Yang mana dalam masa penjajahan masyarakat merasa sangat dizalimi oleh penjajah. Oleh karena itu masyarakat menginginkan suatu sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem

⁶⁶ Pengertian *Staatsfundamentalnorn* adalah norma dasar yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi dan undang-undang dasar suatu Negara termasuk norma pengubahnya. *Staatsgrundgesetz* merupakan kelompok norma hukum di bawah Norma Fundamental Negara, yang di Negara Indonesia dituangkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, hal 27-32)

⁶⁷ Budiono Kusumohamidjojo. *Op.cit*, hal 112

zaman penjajahan dengan mengemukakan suatu sistem ekonomi yang baru yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Perekenomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1), “Perekenomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”. Prinsip kekeluargaan merupakan prinsip pokok yang menjadi sentral utama dalam demokrasi ekonomi Indonesia. Dalam prinsip kekeluargaan tersebut mengandung makna bahwa antara seseorang dengan seseorang lain saling memiliki perasaan satu keluarga sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan merugikan orang lain.

Prinsip kekeluargaan tersebut hanya didapat dalam usaha bersama. Bila untung sama-sama dirasakan bila rugi juga sama-sama ditanggung. Usaha bersama tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah dalam bentuk koperasi.

2. Penguasaan Negara Yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3). Untuk mengetahui maksud kalimat pasal mengenai cabang-cabang produksi penting dikuasai negara tersebut dalam hal apa saja. Oleh karena itu kita perlu melihat dalam beberapa undang-undang diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Cabang-cabang produksi penting tersebut seperti pertambangan, persenjataan, satelit dan telekomunikasi dikuasi oleh negara. Hal ini penting untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Hak Milik Perorang Diakui dan Memperhatikan Kepentingan Umum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak milik terdiri dari dua hal: hak milik pribadi dan hak milik umum (Negara)⁶⁸. Tujuan norma tersebut ditetapkan adalah guna mencegah setiap bentuk perbuatan yang membahayakan pemilik harta atau membahayakan orang lain, dan berdampak negatif dalam proses ekonomi.

Disinilah terlihat dari pengawasan Negara. Pemerintah mengakui milik pribadi, namun bila milik pribadi tersebut mengganggu perekonomian nasional (kepentingan umum) maka hak milik tersebut dapat dieliminir. Orang yang mempergunakan hak milik tersebut tentunya dapat diberikan sanksi oleh Negara.

Perbedaan dengan sistem ekonomi kapitalis, yang lebih mengagungkan agungkan hak milik pribadi atau individu. Sehingga hak milik merupakan hal yang dinomor satukan. Lain hal dengan sistem ekonomi sosialis, yang mana lebih mengagungkan kepemilikan kolektif dan mengebiri kepemilikan pribadi. Namun dalam sistem demokrasi ekonomi Indonesia, penempatan hak milik pribadi dan kepemilikan kolektif tersebut ditempatkan dalam posisi yang seimbang.

⁶⁸ Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konsep demokrasi Indonesia bukanlah sosialis atau kapitalis tetapi suatu bentuk ekonomi politik yang merupakan kombinasi dari ketiga sistem, yakni politik, ekonomi dan moral-kultural. Oleh karena itu sistem ideal bukanlah campuran antara kapitalisme dan sosialisme, tetapi demokrasi Indonesia adalah campuran antara sistem dinamis politik, ekonomi dan moral-kultural. Hal ini penting karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mengutamakan kerukunan dan kegotongroyongan. Kemudian dalam politik masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dalam menentukan sesuatu. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai kerukunan, kegotongroyongan dan musyawarah yang telah hidup dalam masyarakat.

4. Keadilan Sosial

Asas keadilan sosial diambil dari sila ke-lima Pancasila, “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan sosial merupakan suatu sila penutup dari ke empat sila sebelumnya.

Keadilan sosial tersusun dari dua kata yakni adil dan sosial. untuk mengatakan keadilan memang sesuatu yang sulit. Walaupun demikian kita perlu memberikan suatu defenisi mengenai keadilan. Menurut Franz von Magnis, keadilan dibataasi sebagai *tribune jus suum cuique* artinya memberi masing-masing haknya.⁶⁹

Bila kita melihat sejarah, pada zaman Romawi kita kenal paham-paham tentang keadilan, antara lain: “*Summum ius, summa iniura*”, bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi, maksudnya bahwa di dunia ini tidak akan diperoleh keadilan yang sebenarnya, sebab kemungkinan saja

⁶⁹ Franz von Magnis. 1976. *Keadilan Sosial: Apa itu?* Dalam orientasi, hal 23 dikutip oleh Kirdi Dipoyudo. 1985. *Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila I Keadilan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali, hal 23

keadilan yang tertinggi itu bagi seseorang, tetapi bagi orang lain adalah ketidakadilan tertinggi.⁷⁰

Asas lain dari hukum Romawi dikatakan: "*Justitia est contans et perpetua voluntas ius suum quique tribuendi*", artinya keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya, untuk memberi pada tiap-tiap orang, apa yang menjadi haknya. Pengertian ini diperoleh dari ajaran Ariestoteles. Selanjutnya dikatakan, "*Juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere*", artinya peraturan-peraturan dasar hukum adalah hidup dengan patut tidak merugikan orang lain, memberi pada orang lain, apa yang menjadi bagiannya.⁷¹

Sedangkan kata sosial menunjuk pada masyarakat, dalam hal-hal tertentu sebagai subjeknya dan dalam hal-hal lain sebagai objek atau sasarannya. Artinya, disatu pihak keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk Negara agar demi tercapainya kesejahteraan umum membagi beban dan berkat kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu yang lemah, dan dilain pihak mewajibkan para warga Negara untuk memberikan kepada masyarakat apa yang menjadi haknya.⁷² Secara demikian keadilan sosial mengatur hubungan masyarakat dengan warganya dan sebaliknya.

Tujuan keadilan sosial adalah menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapat bantuan seperlunya. Pemerintah sebagai pimpinan Negara bertugas untuk memajukan kesejahteraan yang merata dan dalam rangka itu berhak dan

⁷⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Sun Printing, hal 156

⁷¹ *Ibid*, hal 157

⁷² Kirdi Dipoyudo. 1985. *Op.cit*, hal 31

berkewajiban untuk menuntut kepada warga negaranya agar memberikan sumbangan mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.⁷³ Seperti dalam hal pajak, bagi mereka yang mempunyai penghasilan yang tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula. Sedangkan bagi warga Negara yang mempunyai penghasilan yang rendah atau miskin maka mereka akan membayar pajak sedikit atau malah tidak usah membayar pajak.

Dalam tulisan ini diberikan merumuskan tersendiri mengenai keadilan sosial dalam pandangan demokrasi ekonomi Indonesia dalam pengaturan saham. Bahwa keadilan sosial tersebut mencakup dua hal, yakni keadilan sosial bagi sesama pemegang saham dan keadilan sosial bagi masyarakat. Keadilan sosial bagi sesama pemegang saham seperti dapat memberikan suara dalam penetapan Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS serta memiliki kedudukan yang sama dalam RUPS. Sedangkan keadilan sosial bagi masyarakat seperti adanya masyarakat menikmati dividen saham. Yang mana menikmati dividen saham tersebut mungkin dapat dalam bentuk perusahaan menyediakan beasiswa untuk pelajar, atau pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin dan bantuan pangan dan lain sebagainya. Penjelasan tersebut perlu diutarakan dalam tulisan ini untuk membuat jelasnya maksud keadilan sosial dalam perspektif penulis.

5. Musyawarah Mufakat

Prinsip musyawarah sebenarnya berakar dari budaya bangsa Indonesia. Khusus diranah Minang musyawarah merupakan hal yang dilakukan sebelum mengambil keputusan. Hal ini sesuai dengan pepatah petiti minang, *Ka hilie jalan ka Kumani, sasimpang jalan ka Singkarak. Saukuah mangko manjadi*,

⁷³ Ibid

sasuai mengko takanak yang diartikan sesuatu hendaklah dilakukan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, satu pendapat dan satu tujuan. *Kaduo kato mufakat, sakato urang kasamonyo, elok sapaham sahakikat, santosa kito salamonyo*, yang artinya satu pendapat dan satu gerak, satu tujuan akan melahirkan kesentosaan dan kebahagiaan dalam masyarakat.⁷⁴ Kemudian jiwa dari asas ini dinormatiskan menjadi dasar Negara yang terdapat dalam Pancasila, sila ke-empat yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Walaupun asas ini lebih menitik beratkan musyawarah dalam ranah politik namun demikian asas ini juga dapat digunakan dalam sistem perekonomian nasional.

Dalam perekonomian Indonesia prinsip musyawarah mufakat ini digunakan dan diterapkan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Guna dilakukan musyawarah adalah untuk kemajuan ekonomi dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat (rakyat). Bila ada pertentangan para pihak dalam bisnis penyelesaian juga dilakukan dengan jalan musyawarah tidak menggunakan kekerasan atau paksaan.

Dalam asas musyawarah mufakat, semua orang mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak bicara dan hak suara mengutarakan pendapat dan argumentasinya hingga ditemui suatu pilihan yang paling sempurna atau baik untuk disepakati bersama. Yang pada akhirnya mencapai suatu kemufakatan bulat untuk menyelesaikan permasalahan guna memperoleh keuntungan bersama. Prinsip musyawarah menuju mufakat dapat ditempuh dengan suara bulat (*concensus*) dan bisa pula dengan suara terbanyak (*majority vote*). Pilihan antara suara bulat atau dengan suara terbanyak, semuanya tergantung dari semua

⁷⁴ H. Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu. 2001. *1000 Pepatah Petitih, Mamang, Bidal, Pantun, Gurindam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, Cet V, hal 28-29

pihak mana yang dipilih. Namun sebaiknya yang namanya musyawarah mufakat tersebut merupakan keserempakan para peserta musyawarah dalam menilai dan memutuskan sesuatu hal.

6. Larangan Praktek Monopoli

Prinsip ekonomi berikutnya adalah larangan praktek monopoli. Prinsip ini dapat kita lihat dalam Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang salah satu isinya mengenai larangan persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Prinsip larangan monopoli dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁷⁵

Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi bila perekonomian dimonopoli oleh segelintir orang yang bertujuan untuk memperoleh untung besar yang tentunya akan mengebiri rasa keadilan dari masyarakat. Masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan masyarakat miskin akan semakin miskin. Sehingga jurang antara yang kaya dan miskin semakin lebar. Oleh karena itu pengawasan dan campur tangan dari Negara sangat penting disini untuk mencegah monopoli yang bermuara pada semakin lebarnya jurang antara yang kaya dan yang miskin.

C. Prinsip Demokrasi Ekonomi Indonesia Dalam Pengaturan Saham Perusahaan

Dalam bagian ini pembaca dibawa untuk berselancar dalam samudra pemikiran mengenai pengaturan saham apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip

⁷⁵ Pasal 4 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip demokrasi ekonomi Indonesia tersebut telah dijabarkan dalam sub bab di atas.

1. Asas Kekeluargaan

Sebagaimana dijelaskan pada sub bagian sebelumnya bahwa asas kekeluargaan di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1), “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”. Prinsip kekeluargaan merupakan prinsip pokok yang menjadi sentral utama dalam demokrasi ekonomi Indonesia. Dalam prinsip kekeluargaan tersebut mengandung makna bahwa antara seseorang dengan seseorang lain saling memiliki perasaan satu keluarga sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan merugikan orang lain.

Saham merupakan suatu prinsip perkumpulan modal. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip keluarga yang mengedepankan usaha bersama. Perkumpulan modal tentunya berorientasi keuntungan yang besar bagi yang memiliki modal yang besar. Sedang dalam usaha bersama yang dikemas dalam prinsip kekeluargaan keuntungan dirasakan bersama oleh semua anggota secara proporsional dan begitu juga dengan kerugian.

Dalam saham prinsip keluarga tidak tergambar, yang ada hanyalah ketamakan dan penguasaan terhadap harta kekayaan. Hal tersebut terlihat dari nilai nominal yang terdapat pada saham yang menggunakan rupiah. Subjek hukum yang memiliki sahamlah yang akan diperhatikan dan mengatur perseroan. Bahkan bila kepentingan pemegang saham di rugikan oleh Perseroan, pemegang saham dapat melakukan beberapa langkah:

- a. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dalam hal tindakan perseroan

dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar yang merugikan pemegang saham sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.⁷⁶

- b. Meminta kepada Perseroan agar membeli sahamnya dengan harga yang wajar apabila pemegang saham tidak setuju tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan, atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.⁷⁷
- c. Namun apabila perseroan tidak bisa membeli (karena kalau membeli akan melanggar Pasal 37 ayat (1) huruf b UUPT), perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga bila juga tidak dilakukan oleh Perseroan maka dapat mengajukan ke pengadilan negeri

Dengan demikian uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam UUPT sekurang-kurangnya pemegang saham masih bisa menutup kerugiannya jika ia memutuskan untuk meninggalkan perseroan melalui pengadilan.

Hal lain yang tidak mencerminkan adanya rasa kekeluargaan dalam saham terlihat dalam akuisisi (pengambilan) saham. Yang mana pemegang saham yang memiliki strata utama, dapat melakukan akuisisi *freezeout* (jalur keluar dengan dibekukan) atau *squeezeout* (jalur keluar dengan tekanan) terhadap pemegang saham yang memiliki strata menengah. Akuisisi *freezeout* adalah akuisisi yang dilakukan untuk mengusir pemegang saham strata menengah dari perusahaan. Sedangkan akuisisi *squeezeout* adalah akuisisi yang bertujuan untuk mengusir pemegang saham strata menengah dari perusahaan tapi dilakukan secara tidak

⁷⁶ Pasal 61 UUPT

⁷⁷ Pasal 62 UUPT

langsung, yakni membuat kedudukan pemegang saham strata menengah sedemikian tidak enak dan tidak menguntungkan, sehingga akhirnya pihak pemegang saham strata menengah keluar dengan sendirinya dari perusahaan tersebut.⁷⁸

Salah satu bentuk yang akan dilakukan oleh pemegang saham strata utama dalam melakukan akuisisi *freezeout* adalah dengan pembesaran saham (*reverse stock split*), yang mana dilakukan dengan membesarkan nilai nominal sehingga pemegang saham strata menengah sampai memegang saham pecahan yakni sekian saham tambahan sepersekian saham (tidak sampai satu saham). Kemudian Perseroan untuk alasan praktis, saham pecahan tersebut dibayar secara kontan.⁷⁹

Bila kita perhatikan dalam Pasal 126 UUPT, yang menyatakan:

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan

Pasal di atas, tidak ada menjabarkan lebih lanjut mengenai kerugian pemegang saham minoritas (strata saham menengah). Kemudian kewajiban sebagainya disebutkan dalam Pasal di atas tidak memiliki sanksi bila tidak dilaksanakan. Sehingga rasa kekeluargaan dari pemegang saham tidak ada tergambar. Maka wajar

⁷⁸ Munir Fuady. 2005. *Perlindungan Saham Minoritas*. Bandung: CV. Utomo, hal 141

⁷⁹ *Ibid*, hal 144

bila saham tersebut tidak ada menggambarkan rasa kekeluargaan yang ada hanyalah rasa keuangan dan keuntungan dari para pihak yang memiliki saham terutama kepentingan pemegang saham strata utama.

2. Penguasaan Negara Yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak

Penguasaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di implementasikan dalam bentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Yang mana pemerintah memiliki saham yang mayoritas atau memiliki saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen).⁸⁰ Disinilah baru berperan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan pemerintah memiliki saham mayoritas maka pemerintahlah yang paling banyak mendapatkan dividen. Keuntungan saham (dividen) yang dimiliki pemerintah itu, nantinya akan dipergunakan untuk kegiatan pemerintahan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Artinya disinilah Negara dapat berfungsi untuk memperoleh keuntungan yang besar, kemudian dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun khusus bagi perusahaan swasta, peran Negara dalam bentuk saham sangat kecil bahkan dapat dikatakan tidak ada. Jika hal ini terjadi, maka bila perusahaan tersebut untung, maka pemerintah tidak akan mendapatkan manfaatnya, karena pemerintah tidak memiliki saham di dalam perusahaan swasta tersebut. Sehingga kepentingan Negara untuk mensejahterakan masyarakat sulit untuk dilakukan.

⁸⁰ Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Kemudian dalam hal pertambangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasi oleh Perseroan swasta yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing. Akibatnya, kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pemegang saham perseroan swasta tambang tersebut (pemegang saham asing). Maka wajar pada hari ini bila minyak dunia naik minyak dalam negeri naik pula, karena pertambangan kita di kuasai oleh Perseroan asing. Ini memperlihatkan bahwa Negara tidak menguasai pertambangan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi untuk pemegang saham Perseroan Asing.

3. Hak Milik Perorangan Diakui dan Memperhatikan Kepentingan Umum

Sebagaimana telah dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya. Bahwa dalam demokrasi ekonomi Indonesia memiliki keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁸¹.

Namun bila kita lihat dalam pengaturan mengenai saham, keseimbangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum tidak tergambar. Saham sangat mengagungkan hak milik perorangan. Bila hak ini dikebiri oleh RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris, maka pemegang saham dapat menggugatinya. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.⁸² Namun dalam UUPT tidak ada yang menyebutkan bahwa pengajuan gugatan oleh pemegang saham tersebut dapat menunda keputusan RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Artinya hak pemegang saham secara pribadi diakui, namun sebenarnya hanya sebagai

⁸¹ Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸² Pasal 61 UUPT

a. Keadilan Sosial Dalam RUPS

RUPS merupakan organ Perseroan yang memiliki kewenangan yang mana kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris yang dikenal dengan istilah *residual power* (kewenangan sisa). Di dalam RUPS inilah para pemegang saham akan menentukan arah kebijakan dari Perseroan. Artinya RUPS memiliki kedudukan yang strategis dalam menentukan arah kebijakan Perseroan, terutama bila yang berkaitan dengan menguasai saham pada beberapa Perseroan yang mengakibatkan terjadinya monopoli saham.

Untuk menciptakan suatu keadilan bagi pemegang saham sebaiknya dalam pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan dengan asas *one share one vote*, artinya setiap satu saham memiliki satu suara. Menurut Munir Fuadi asas *one share one vote* tersebutlah yang dianggap paling demokrasi dalam pengambilan putusan dalam sebuah Perseroan.⁸³ Namun bila kita perhatikan dalam Pasal 84 UUPT, “Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain”. Melihat pasal tersebut terlihat suatu ambivalensi, yang mana dalam pengambilan suara telah ditentukan satu saham satu suara tetapi pada kalimat akhir pasal terdapat pengecualian. Dalam Penjelasan pasal yang dimaksud dengan kecuali anggaran dasar menentukan lain adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

⁸³ Munir Fuady. 2005. *Op.cit*, hal 8

Pengecualian yang terdapat dalam pasal di atas, mempertunjukkan bahwa UUPT menguatkan posisi *contractual theories*. Yang mana karena Perseroan Terbatas tersebut didirikan berdasarkan perjanjian maka perjanjian tersebut dijadikan dasar dalam mengatur secara lebih khusus dalam Perseroan Terbatas tersebut. Bila dalam perjanjian para pihak tersebut yang dijadikan anggaran dasar dalam perusahaan mengatakan bahwa pengambilan keputusan dalam RUPS ditentukan oleh pemegang saham strata utama, dan semua pihak telah sepakat. Maka ketentuan tersebut menjadi aturan bagi para pihak dalam perusahaan.

Dengan demikian, memang keadilan sosial tidak terdapat dalam pasal di atas, yang terlihat hanya keadilan uang yang diimplementasikan dalam bentuk saham mayoritas (strata saham utama). Sehingga tujuan keadilan sosial untuk menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapat bantuan seperlunya tidak akan terwujud dengan pasal tersebut.

b. Keadilan Sosial Dalam Pembagian Keuntungan

Dalam saham tidak mengenal pembagian keuntungan berdasarkan proposional keadilan yang memperhatikan masyarakat. Yang ada hanya pembagian keuntungan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Semakin besar pemilikan subjek hukum atas saham maka semakin besar pula pembagian dividen yang akan diperoleh nantinya, begitu juga sebaliknya jika Perseroan tersebut

mengalami kerugian maka pemegang saham yang paling banyaklah yang akan mengalami kerugian.

Dalam hal kerugian pemegang saham akan mengalami kerugian berdasarkan atas berapa banyak saham yang dimilikinya. Artinya, bila pemegang saham rugi, maka pemegang saham itu sendiri saja yang mengalami kerugian tersebut.

Dalam saham tidak mengenal bantuan bagi orang yang lemah dan butuh bantuan. Karena sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa saham hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*) yang sebesar-besarnya bagi individu-individu pemilik saham.

Dalam tulisan ini, karena menyangkut dengan monopoli saham maka digunakan istilah strata dari pada istilah klasifikasi. Penggunaan strata saham, ini berkaitan dengan kekuasaan dari pemegang saham dalam mengendalikan Perseroan. Semakin tinggi strata sahamnya maka semakin besar pengaruhnya terhadap pengendalian terhadap perusahaan. Pembagian strata saham di Indonesia diuraikan sebagai berikut;

a. Strata Saham Bawah

Strata saham bawah, adalah pemegang saham dalam perseroan yang tidak dapat berbuat banyak dalam perseroan. Pemegang saham strata bawah ini hanya mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemegang saham yang lebih tinggi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini terjadi karena pemegang saham strata bawah ini hanya dapat menghadiri RUPS tanpa memiliki hak suara.

b. Strata Saham Menengah

Strata saham menengah, yaitu strata saham yang diperuntukan bagi pemegang saham biasa. Pemegang saham pada strata menengah memiliki hak suara dalam RUPS. Namun karena jumlahnya saham yang dimilikinya tidak banyak (pemegang saham minoritas) sehingga tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan perseroan pada RUPS.

c. Strata Saham Utama

Strata saham utama merupakan pemegang saham pengendali dalam perseroan. Pemegang saham strata utama ini memiliki hak yang tidak dimiliki oleh strata dibawahnya, seperti mempunyai hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris. Pemegang saham strata utama ini timbul karena dua hal, yakni dari jumlah suara bisaa yang dimilikinya bersifat mayoritas; dan atau, memang ditentukan oleh anggaran dasar.

Bila divisualisasikan dalam bentuk gambar terlihatlah bahwa strata pemegang saham ini seperti piramida. Dimana puncaknya diduduki pemegang saham strata utama dan pada bagian bawahnya diduduki pemegang saham strata bawah. Berikut visualisasi piramidanya:

Gambar 3: Piramida Strata Pemegang Saham Perseroan



Perlu di ketahui bahwa strata pemegang saham seperti yang dijelaskan di atas dapat saja tidak seperti gambaran di atas, semua tergantung anggaran dasar masing-masing perseroan. Namun perlu ditegaskan bahwa dalam monopoli saham selalu akan terdapat minimal dua strata yakni strata utama dan strata bawah.

Strata saham utama menyebabkan strata saham bawah dan strata saham menengah berada pada posisi yang tidak berdaya dalam menegakkan kepentingnya. Kedudukan hukum para pemegang saham strata saham bawah dan strata saham menengah jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi Direksi atau Dewan Komisaris yang merugikan Perseroan, justru disebabkan oleh kedudukan strata saham utama yang identik dengan eksistensi dua organ perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan. Dilain hal keadilan juga tidak terlihat bagi pemegang saham strata saham bawah dan strata saham menengah, yang mana pemegang saham strata bawah dihambat untuk mewakili kepentingan Perseroan karena prinsip *persona standi in judicio* atau *capacity standing in court or in judgement*, yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang tidak lain dilakukan oleh Direksi.

Keuntungan yang diperoleh pemegang saham dalam bentuk dividen tidak ada suatu kewajiban yang diatur menurut hukum untuk memberikan atau membagi keuntungan yang diperoleh tersebut kepada masyarakat. Kewajiban untuk membagi keuntungan hanya ditujukan kepada perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) dan lingkungan, namun kewajiban tersebut hanya untuk Perseroan yang

menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.⁸⁴

Makna tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan tanggung jawab yang hanya disertai sanksi moral. Sehingga tidak salah apabila pemahaman sebagian Perseroan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) hanya sebatas tanggung jawab moral yang diwujudkan dalam bentuk kedermawanan (*philanthropy*) maupun kemurahan hati (*charity*).⁸⁵

5. Musyawarah Mufakat

Musyawarah pemegang saham dilakukan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *general shareholders' meeting* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Algemene Vergadering van Aandeelhouders*. Dalam Pasal 1 butir (4) disebutkan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”.

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa “Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat”. Dalam penjelasan atas Pasal 87 ayat (1) UUPT tersebut dinyatakan “yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS. Hanya saja, ketentuan UUPT tersebut kurang ada penjabarannya, sehingga tidak

⁸⁴ Pasal 74 UUPT

⁸⁵ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: In-Trans Publising, hal 4

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA PRAKTEK MONOPOLI SAHAM PERUSAHAAN DAN DAMPAK NEGATIF PRAKTEK MONOPOLI SAHAM PERSEROAN TERBATAS SWASTA

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Praktek Monopoli Saham Perseroan Terbatas Swasta

1. Faktor Undang-Undang

a. Prinsip Perseroan

Jika menelaah konsep Perseroan, maka asumsi awal yang terbentuk dipikiran kita cenderung berdimensi ekonomi (kapital) dalam arti pembiakan modal individual daripada kekeluargaan (tolong menolong) dalam konteks komunal atau kebersamaan atau kekeluargaan dengan tujuan pemerataan bagi jumlah maksimal komunitas. Hal ini disebabkan, aktivitas bisnis yang dijalankan pelaku ekonomi termasuk Perseroan selalu bertujuan mengejar keuntungan (profit) dan menghasilkan sebanyak mungkin uang (*Business pursues profits, and that means making money is their first priority*).

Perseroan tidak mempertimbangkan dampak yang dirasakan negara ataupun masyarakat ketika ia memindahkan investasi ke usaha lain atau memindahkan investasi ke negara lain sehingga akibat perbuatan tersebut tercipta pengangguran, hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, ataupun beragam dampak luas lainnya (*multiplier effects*) seperti sosial, ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Ini disebabkan, Perseroan dengan

kekuatan modal yang dimiliki dalam bertindak selalu didasari pilihan rasional (*rational choice*) dengan memperhitungkan *opportunity cost* (rugi yang menguntungkan) dari setiap keputusan bisnis yang dilakukan yang selalu dikaitkan dengan efisiensi demi memperbesar profit bagi kepentingan pemegang saham atau pemilik saham. Artinya, keputusan bisnis Perseroan tidak pernah berbasis pada pertimbangan moralitas apalagi diwarnai semangat berderma (*charity*). Keputusan bisnis yang dilakukan selalu dilandasi kalkulasi untung (*benefit*) dan rugi (*cost*) atas berbagai pilihan yang ada.

Adam Smith menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat yang serakah.⁸⁹ Sifat serakah menjadi dasar berpikir kapitalis. Pola pikir kapitalis inilah yang terkenal dengan jargon dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang disinyalir penyebab lahirnya monopoli. Dimana orang yang memiliki modal akan berusaha dengan alatnya yang bernama Perseroan untuk meningkatkan modalnya. Salah satu jalan yang dilakukan oleh kapitalis tersebut tentunya bagaimana ia dapat menguasai pasar yang dikenal dengan istilah monopoli. Padahal sejatinya monopoli adalah musuh atau barang haram di ekonomi pasar bebas karena melanggar prinsip kebebasan itu sendiri, dimana dengan adanya monopoli pihak lain terhadang untuk masuk pasar yang ujung-ujungnya bermuara pada kerugian di pihak konsumen atau masyarakat. Sebab dengan monopoli muatan dasar harga bisa dikendalikan. Singkat kata, konsumen berpotensi mendapatkan barang atau produk dengan muatan yang rendah dengan harga yang tinggi atau mahal.

⁸⁹ Deliarnov. 2003. *Op.cit*, hal 30

Sederetan penjabaran di atas dapat diketahui, bahwa monopoli merupakan efek dari perilaku mencari keuntungan yang sebesar-besarnya melalui Perseroan tanpa memperhatikan orang lain atau masyarakat sekitar. Monopoli tersebut hanya buah dari pemikiran membiakan kapital (uang).

b. Perjanjian Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan dengan perjanjian. Yang mana perjanjian merupakan suatu perbuatan dua atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁹⁰ Sedangkan menurut ilmu Pengetahuan hukum perdata, *perjanjian* adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut mengikat kedua belah pihak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata “pada prinsipnya semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya, dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka”.

Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bentuk apapun dibolehkan, karena perjanjian pada prinsipnya bersifat terbuka. Namun walaupun demikian kebebasan berkontrak tersebut bukanlah berarti bebas sebebas-bebasnya tapi ada batasan, aturan dan norma-norma tertentu yang harus diikuti. Seperti:

Pasal 1320 KUPerdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

⁹⁰ Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat perjanjian pertama dan kedua disebut dalam pasal di atas merupakan syarat subjektif, karena dua unsur ini langsung menyangkut orang atau subjek hukum yang melakukan perjanjian. Apabila salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan dapat dibatalkan oleh hakim. Maksudnya perjanjian tersebut selama belum dibatalkan oleh hakim tetap berlaku. Pembatalan perjanjian berlaku sejak putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Syarat perjanjian ketiga dan keempat dalam pasal di atas, merupakan syarat objektif. Karena menyangkut kepada objek yang diperjanjikan. Jika salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum ini berarti perjanjian tersebut dianggap sejak semula (*ex tunc*) tidak pernah ada. Sehingga posisi kedua belah pihak dikembalikan pada posisi yang semula sebelum perjanjian tersebut dibuat.

Di samping itu, juga perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut menjadi undang-undang dan berlaku bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Maksud sebagai undang-undang perjanjian tersebut adalah bahwa perjanjian tersebut bila dilanggar oleh para pihak maka alat Negara dapat melakukan tindakan.

Dalam pendirian Perseroan, perjanjian para pihak tersebut dituangkan dalam akta notaris.⁹¹ Akta pendiri tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPA. Dalam anggaran dasar Perseroan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (1) UUPA:

- i. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- ii. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- iii. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- iv. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- v. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
- vi. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- vii. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, dikenal adanya dua macam perjanjian, yaitu:⁹²

- i. *Inspanningsverbintenis*, yaitu perjanjian upaya, artinya kedua belah pihak yang berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang diperjanjikan.

⁹¹ Pasal 7 ayat (1) UUPA

⁹² Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 13

- ii. *Resultaatverbintenis*, yaitu suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu *resultaat*, yaitu suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Perjanjian para pihak yang dituangkan dalam akta notaris yang kemudian menjadi anggaran dasar perseroan termasuk pada perjanjian *resultaatverbintenis*, sebab para pihak berjanji dengan berbagai hak dan kewajiban yang sudah dijelaskan untuk menjalankan perseroan guna mendapatkan keuntungan. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut menjadi undang-undang bagi para pihak yang harus dilakukan. Bila tidak dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan maka para pihak yang tidak melaksanakan tersebut dapat dikenakan sanksi.

Adanya klausula penetapan hak-hak tertentu untuk strata saham tersebutlah yang merupakan salah satu faktor semula timbulnya monopoli. Dalam anggaran dasar tersebut akan disebutkan beberapa klausula yang memberikan hak khusus kepada subjek hukum yang memiliki saham strata saham tertentu (utama) untuk menentukan arah atau jalannya perseroan. Dan biasanya hak khusus tersebut diberikan oleh orang yang memiliki kemampuan yang berlebih seperti orang yang memiliki modal yang banyak. Yang mana orang yang memiliki modal banyak tersebut akan memperoleh persentase saham yang paling besar, tentunya banyak pula mendapatkan hak.

Pemberian hak khusus kepada pemilik modal tersebut sah-sah saja. Namun bila penerima hak khusus ini tidak hanya memiliki satu perseroan, disinilah menimbulkan permasalahannya. Dimana subjek hukum ini dapat saja mengatur dua perusahaan atau lebih dan mempengaruhi pasar. Disinilah baru menimbulkan dampak berupa perbuatan monopoli. Hal inilah yang

sesuai dengan rasio dari *contractual theories* yang mana mengatakan bahwa perseroan terbentuk dari perjanjian⁹³. Sehingga perseroan (perusahaan) membatasi tanggung jawab sosial dan menciptakan entitas yang sulit dipengaruhi oleh Negara, karena keengganan digunakannya perusahaan sebagai alat Negara untuk mensejahterkan warganya karena adanya perjanjian para pihak tersebut.

c. Akuisisi Saham

Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan Terbatas tersebut. Salah satu tujuan dilakukan akuisisi tersebut adalah untuk kepentingan bisnis (*business purpose test*), yakni supaya bisnis yang dilakukan cepat berkembang dan pasarnya semakin luas.

Salah satu cara untuk menguasai suatu Perseroan Terbatas adalah dengan mengambil alih (akuisisi) saham. Pengambil alihan ini lah yang dituju oleh pelaku usaha untuk menguasai pasar karena prosesnya tidak serumit merger dan konsolidasi. Akibat penguasaan mayoritas atas saham perseroan oleh pelaku usaha yang melakukan akuisisi tersebut, tentunya juga akan membawa kearah penguasaan manajemen dan jalannya perseroan. Perbuatan akuisisi yang dilakukan oleh pelaku usaha secara terus menerus pada akhirnya akan menimbulkan monopoli.

⁹³ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Op.cit*, hal 28

Akuisisi saham merupakan salah satu bentuk akuisisi yang paling umum ditemui dalam hampir setiap kegiatan akuisisi. Akuisisi tersebut dapat dilakukan baik dengan:

- i. Membeli seluruh maupun sebagian saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan; maupun dengan atau tanpa;
- ii. Melakukan penyetoran atas sebagian maupun seluruh saham yang belum dan akan dikeluarkan perseroan.

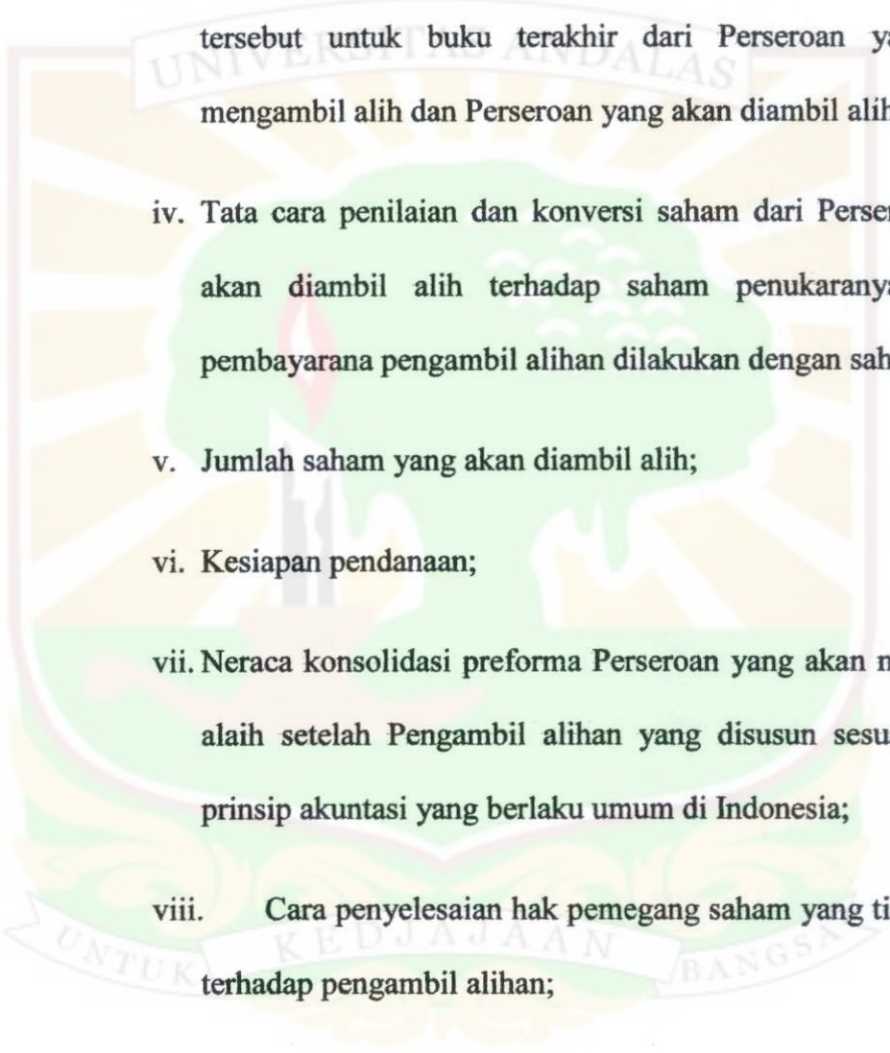
Saham yang diakuisisi merupakan saham yang telah dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam melakukan akuisis dapat dilakukan melalui dua jalur:

a) Jalur Direksi

Dalam hal pengambil alihan dilakukan melalui jalur Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksud untuk melakukan pengambil alihan (akuisisi) kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih atau akuisisi. Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambil alihan yang memuat sekurang-kurangnya⁹⁴:

- i. Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- ii. Alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;

⁹⁴ Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

- 
- iii. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuisitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut untuk buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- iv. Tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukaranya apabila pembayarana pengambil alihan dilakukan dengan saham;
- v. Jumlah saham yang akan diambil alih;
- vi. Kesiapan pendanaan;
- vii. Neraca konsolidasi preforma Perseroan yang akan mengambil alaih setelah Pengambil alihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- viii. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap pengambil alihan;
- ix. Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggot Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;

- x. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada direksi perseroan;
- xi. Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambil alihan apabila ada.

b) Langsung Pemegang Saham

Subjek hukum yang akan melakukan pengambil alihan (akuisisi) saham langsung dari pemegang saham tidak sesulit dengan jalur Direksi. Perlu diperhatikan dalam melakukan pengambil alihan (akuisisi) saham langsung dari pemegang saham harus memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Daam hal akuisis dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambil alihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Kemudian masing-masing perseroan yang akan melakukan Akuisisi tersebut menyusun rancangan akuisisi berdasarkan usulan rencana akuisisi dan rancangan ini harus mendapat persetujuan RUPS masing-masing pihak. Selanjutnya wajib mengumumkan rancangan akuisisi dalam dua surat kabar harian dan memberitahukannya kepada karyawan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.⁹⁵

Apabila suatu akuisisi saham menimbulkan suatu monopoli maka akuisisi tersebut dilarang. Artinya tujuan akuisisi yang awalnya dilakukan untuk kepentingan bisnis (*business purpose test*), yakni supaya bisnis yang dilakukan cepat berkembang dan pasarnya semakin luas berubah jalur untuk menguasai pasar (monopoli). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 28 ayat (2), "Pelaku usaha dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

Dalam melakukan akuisisi juga memperhatikan status kepemilikan dari Perusahaan yang akan diakuisisi (pengambil alihan) saham. Bentuk kepemilikan Perusahaan dibagi menjadi tiga bentuk, yakni Perusahaan (Perseroan Terbatas) terbuka, Perusahaan (Perseroan Terbatas) tertutup⁹⁶ dan Perusahaan (Perseroan Terbatas) Keluarga⁹⁷. Untuk Perusahaan terbuka, artinya Perusahaan tersebut telah GoPublik, maka akuisisi sahamnya harus

⁹⁵ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

⁹⁶ Perusahaan (Perseroan Terbatas) tertutup adalah perusahaan yang sahamnya belum dijual di Pasar Modal

⁹⁷ Perusahaan (Perseroan Terbatas) keluarga adalah perusahaan yang sahamnya hanya dimiliki oleh keluarga

dilakukan melalui Pasar Modal dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal. Sedangkan untuk Perusahaan tertutup dan Perusahaan keluarga tidak perlu melalui Pasar Modal.

d. Ukuran Monopoli Saham

Untuk mengetahui telah terjadinya suatu monopoli saham tentu harus ada alat ukurnya. Alat ukur yang dipergunakan tersebut adalah undang-undang. Dalam Pasal 27 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan bahwa ukuran terjadinya monopoli tersebut yakni:

Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan:

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

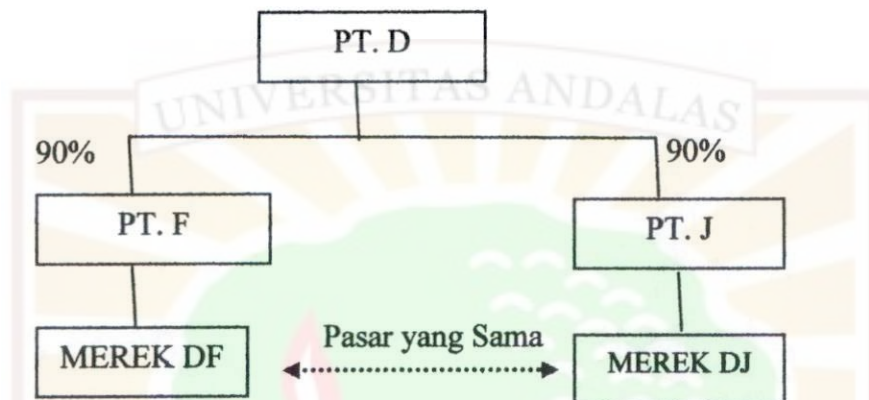
Berdasarkan uraian di atas dalam konteks hukum persaingan usaha, suatu pelaku usaha baru dapat dikatakan monopoli :

- a) Pelaku usaha tersebut memiliki saham mayoritas lebih dari satu perusahaan sejenis:
 - i. melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama;
 - ii. pada pasar bersangkutan yang sama; atau
- b) Pelaku usaha tersebut mendirikan lebih dari satu perusahaan yang mana memiliki saham mayoritas:

- i. pada kegiatan usaha yang sama;
- ii. pada saat pasar bersangkutan yang sama.

Yang dapat kita ilustrasikan seperti gambar berikut ini:

Gambar 4: Monopoli Saham



Pasal 27 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menggunakan pendekatan *rule of reason*. *Rule of reason* adalah pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai melanggar undang-undang. Pendekatan *rule of reason* menggunakan kata-kata patut diduga atau yang dapat mengakibatkan.

Pengujian terhadap dampak ekonomi seperti tersebut di atas diakui oleh sementara kalangan sebagai salah satu kesulitan dari pembuktian dengan pendekatan *rule of reason*. Hal ini disebabkan oleh hampir tidak mungkin untuk dapat menetapkan tingkat persaingan terlebih dahulu secara terpisah dari produk dan harga. Apalagi, terdapat kenyataan bahwa ada beberapa

transaksi bisnis yang dievaluasi berdasarkan hukum *antitrust* sebelum secara nyata melakukan tindakan yang berdampak anti kompetitif.⁹⁸

Dalam mengevaluasi mengenai luasnya kerugian kompetitif, biasanya akan selalu ditentukan pangsa pasar (*market share*) pihak tergugat di pasar terkait (*relevant market*). Semakin tinggi pangsa pasar suatu perusahaan di pasar, semakin besar pula luasnya kerugian terhadap persaingan, karena pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar (*market power*) yang besar akan dapat meningkatkan harga secara mudah dan memaksakan keuntungan monopoli, dengan biaya yang harus ditanggung oleh konsumen. Jika suatu perusahaan atau pelaku usaha memiliki pangsa pasar yang tinggi, dan jika kekuatan ini digunakan untuk menetapkan harga yang lebih mahal, maka pelaku usaha akan berhasil mencapainya, paling tidak sampai terdapat pelaku usaha baru yang memasuki pasar, yang mampu menjual harga di bawah harga (monopoli) tersebut. Sebaliknya, suatu perusahaan yang hanya memiliki kekuatan pasar yang kecil, relatif tidak memiliki kemampuan untuk mengancam proses persaingan, karena jika bermaksud mencoba menetapkan harga monopoli, maka pelaku usaha lain yang memiliki pangsa besar, misalnya 90%, akan secara mudah menjual harga di bawah barang yang ditetapkan perusahaan (dengan pangsa kecil) tersebut di muka.⁹⁹

Untuk menilai akuisisi yang melahirkan praktek monopoli kita dapat menggunakan pandangan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja¹⁰⁰, yang mengungkapkan bahwa akuisisi dapat mengarah kepada terjadinya monopoli

⁹⁸ A.M. Tri Aggraini. *Penerapan Pendekatan "Rule Of Reason" Dan "Per Se Illegal" Dalam Hukum Persaingan*. dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 24-No 2 – Tahun 2005, hal 5

⁹⁹ *Ibid*, hal 7

¹⁰⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Op.cit.* hal 51-52

dan/atau persaingan usaha tidak sehat ada dua parameter dasar sebagai acuan penilaian yang dipakai, yaitu:

a) Penentuan mengenai pasar bersangkutan

Pada garis besarnya penentuan mengenai pasar bersangkutan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- i. Karakteristik khusus dari masing-masing produk;
- ii. Fasilitas pengadaan produk yang spesifik dari masing-masing produk;
- iii. Harga dari masing-masing produk yang berlaku di masyarakat;
- iv. Sensitifitas dari masing-masing produk terhadap perubahan harga di masyarakat;
- v. Adanya vendor-vendor atau pemasok-pemasok khusus bagi masing-masing produk;
- vi. Pengakuan atas masing-masing produk tersebut oleh masyarakat luas pengguna atau pemakai produk tersebut.

b) Penilaian terhadap tingkat kompetisi pasar bersangkutan yang ada

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kompetisi sebagai akibat dari akuisisi:

- i. Ada tidaknya eliminasi dalam persaingan secara langsung;
- ii. Kemungkinan terjadinya praktek persaingan tidak sehat oleh perusahaan hasil akuisisi;
- iii. Potensi masuknya competitor baru dalam pasar bersangkutan;
- iv. Tendensi atau potensi untuk terulangnya proses akuisisi oleh pelaku-pelaku usaha lainnya;

v. Tren dari pasar bersangkutan;

Setelah melihat para meter di atas, dirasa masih kurang cukup untuk menilai bahwa telah terjadi akuisis yang melahirkan praktek monopoli. Untuk itu perlu dipaparkan suatu pengaturan mengenai kapan dinyatakan telah terjadi akuisisi yang melahirkan praktek monopoli di Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat untuk melihat telah terjadinya praktek monopoli di negaranya dulu menggunakan metode CR-4 (*four-firm ration*) atau rasio empat perusahaan, bahwa dikatakan telah terjadi praktek monopoli apabila dalam suatu pasar terdapat empat perusahaan yang menguasai 75% atau lebih pangsa pasar (*the four-firm concentration 75% or more*). Namun, sekarang di Amerika untuk melihat bahwa telah melahirkan praktek monopoli tidak lagi menggunakan metode CR-4 tapi dengan metode Herfindahl-Hirschman Index (HHI).

Herfindahl-Hirschman Index (HHI) dikembangkan secara terpisah oleh O.C. Herfindahl dan A.O. Hirschman¹⁰¹ dengan cara menjumlahkan kuadrat pangsa pasar individual semua pelaku pasar dalam suatu pasar.

Notasi matematisnya adalah¹⁰²:

$$NHI = \sum_{i=1}^n S_i^2$$

Dimana: n = jumlah perusahaan dalam satu pasar

S_i = pangsa pasar perusahaan i

Dalam menghitung konsentrasi industri, pasar dibagi dalam pasar *atomistis* dengan HHI yang mendekati nol sampai pasar monopoli. Pasar

¹⁰¹ J. Fred Weston, Kwang S. Chung dan Susan E. Hoang. 1990. *Merger, Restructuring, And Corporate Control*. New Jersey: Englewood Cliffs, hal 596 dikutip oleh Iheny Ibrahimi, *Op.cit*, hal 254

¹⁰² Ronald E. Walpole, *Introduction to Statistic*, Third Edition, Gause Indonesia, dan Bambang Sumartini 1993, *Pengantar Statistik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 12 dikutip oleh Iheny Ibrahimi, *Op.cit*, hal 254

dengan hanya seorang pelaku usaha yang menguasai 100% pangsa pasar atau memonopoli secara sempurna (*pure monopoly*) akan memiliki HHI sebesar 10.000 (100^2). Sementara itu, pasar dengan 100 perusahaan yang masing-masing menguasai 1% (satu persen) pangsa pasar, HHI nya adalah 100 ($1^2 \times 100$). Ini menunjukkan bahwa industrinya tidak terkonsentrasi.

Dalam suatu industri yang hanya terdiri atas dua perusahaan masing-masing menguasai 90% dan 10% pangsa pasar, $HHI = 90^2 + 10^2 = 8100 + 100 = 8200$. Jika dua perusahaan masing-masing menguasai 50% pangsa pasar maka $HHI = 50^2 + 50^2 = 2500 + 2500 = 5000$. Lebih lanjut, misalnya dalam suatu industry yang terdiri atas empat perusahaan dimana masing-masing menguasai 30%, 30%, 20%, dan 20% pangsa pasar akan memperoleh HHI sebesar 2600, yaitu dengan menjumlahkan $30^2 + 30^2 + 20^2 + 20^2 = 900 + 900 + 400 + 400 = 2600$.

Untuk memahami cara kerja dan perbedaan perhitungan antara *The four-firm ratio* dan HHI secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam suatu industri produk A, dimana pangsa pasarnya dikuasai oleh 1 (satu) perusahaan sebesar 45% dan sisanya dikuasai oleh 11 (sebelas) perusahaan yang masing-masing menguasai 5%. Dengan metode *the four-firm concentration ratio* atau *CR-4* (empat pelaku pasar yang menguasai pangsa pasar terbesar) diperoleh angka sebagai berikut.

Rasio empat perusahaan $45\% + 5\% + 5\% + 5\% = 60\%$

Sedangkan perhitungan $HHI = (45)^2 + 11(5)^2$
 $= 2025 + 275 = 2300$

Bandungkan dengan suatu industry produk B dengan pangsa pasar yang dikuasai oleh 4 (empat) perusahaan masing-masing 15%, sisanya oleh 8 (delapan) perusahaan dengan pangsa pasar masing-masing 5% maka:

Rasio empat perusahaan $15\% + 15\% + 15\% + 15\% = 60\%$

Sedangkan perhitungan HHI = $4 (15)^2 + 8 (5)^2$

$$= 900 + 200 = 1100$$

Jelas terlihat perbedaan bahwa meskipun industry produk A dan B dengan rasio empat perusahaan menghasilkan penguasaan pangsa pasar yang sama yaitu 60%, namun perhitungan dengan menggunakan HHI menunjukkan perbedaan konsentrasi industry produk A dengan HHI sebesar 2300 sedangkan industry produk B dengan HHI sebesar 110 dimana produk A industrinya lebih terkonsentrasi (*highly concentrated*).

Atas dasar argumentasi tersebut, Departemen Kehakiman mengeluarkan petunjuk teknis pemanfaatan HHI yang sekaligus dapat menjadi *safe-harbour* bagi para pelaku usaha sebagai berikut:

- i. Akuisisi yang menghasilkan HHI dibawah 1000, pasar tidak terkonsentrasi (*unconcentrated*).
- ii. Akuisisi yang menghasilkan HHI antara 100-1800, pasarnya terkonsentrasi secara moderat (*moderately concentrated*).
- iii. Akuisisi yang menghasilkan HHI di atas 1800, pasarnya sangat terkonsentrasi (*highly concentrated*).

Sehubungan dengan aturan tersebut, apabila setelah akuisis HHI berada di bawah 1000 maka Departemen Kehakiman tidak akan bertindak, demikian pula bila akuisisi yang terjadi berada di atas HHI 1000 namun kenaikan HHI masih di bawah 100 poin. Jika akuisisi yang terjadi dalam industri yang agak terkonsentrasi (HHI di antara 1000-1800) namun pertambahan HHI di atas 100 point, ada kemungkinan pengusutan akan dilakukan untuk melihat efek akuisisi tersebut terhadap persaingan. Sementara itu, untuk akuisisi yang

sangat terkonsentrasi (*highly concentrated* HHI di atas 1800), akuisisi dianggap tidak membahayakan apabila pertambahan HHI di bawah 50 poin. Akan tetapi, pertambahan HHI antara 50-100 akan membuka kemungkinan pengusutan sedangkan pertambahan HHI di atas 100 dipastikan akan menghadapi gugatan dari Departemen Kehakiman.

Untuk mengetahui peningkatan konsentrasi suatu industri, pengukuran dilakukan dengan menggandakan pangsa pasar dari dua perusahaan yang mengadakan akuisisi. Jika sebelum akuisisi masing-masing persentasi pangsa pasar dikuadratkan secara individu ($a^2 + b^2$), namun setelah akuisisi, jumlah persentasenya yang dikuadratkan $(a + b)^2$ maka persamaannya menjadi $a^2 + 2ab + b^2$. Peningkatan HHI disini adalah $2ab$. Misalnya, akuisisi antara dua perusahaan masing-masing menguasai pangsa pasar 5% dan 10% maka HHI bertambah $2(5 \times 10) = 100$.

Sedangkan di Indonesia untuk menilai telah terjadi monopoli lebih simpel bila di bandingkan dengan sistem di Amerika Serikat. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Larangan Praktek Monopoli, "satu pelaku atau satu kelompok usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Disinilah letak perbedaan sistem hukum kita dengan sistem hukum barat.

Dibarat dengan sistem hukum yang berasaskan individual menentukan terjadinya praktek monopoli dengan empat orang yang menguasai pangsa pasar dan metode penghitungan yang cermat dan akurat. Sedangkan kita yang menganut sistem kekeluargaan, yang lebih menekankan kebersamaan, Negara Indonesia cukup ditentukan oleh satu orang yang menguasai pangsa pasar. Ini merupakan hal naif untuk dilakukan karena untuk masa sekarang ini,

penentuan satu orang tersebut telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Karena para mafia bisnis dapat melakukan berbagai cara untuk melakukan praktek monopoli, salah satunya dengan memecah perhatian pemerintah namun pada prinsipnya satu orang yang mengendalikan, seperti kasus Tamasek misalnya.

Pelaksanaan dari penilaian ukuran di atas, yang menentukan telah atau tidak terjadinya monopoli saham adalah KPPU.¹⁰³ Oleh karena itu KPPU berperan strategis untuk menilai telah terjadinya suatu monopoli saham.

Namun pengaturan mengenai ukuran monopoli saham dalam 27 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan sesuatu hal yang sudah baku (landasan yuridis) dan KPPU sebagai alat Negara untuk menetapkan dan melaksanakan ukuran baku monopoli saham secara lebih kongkrit lagi dalam bentuk keputusan. Dari hasil buku katalog putusan KPPU periode 2000 sampai Agustus 2008 hanya satu putusan yang menyatakan telah terjadi suatu monopoli saham dalam bentuk kepemilikan silang (*cross ownership*) yakni pada kasus Tamasek yang mana menguasai dua saham mayoritas pada perusahaan telekomunikasi Indonesia (Indosat dan Telkomsel) yang sama-sama bergerak di bidang telekomunikasi melalui anak perusahaannya.

Padahal bila dilihat dalam UUPT, saham merupakan hal yang sangat penting dalam Perseroan. Karena para pemegang saham akan diberikan sejumlah hak, yang mana dengan hak tersebut dapat mengatur jalannya perseroan. Oleh karena itu disinilah letak pentingnya kawal dan imbang (*check and balance*) dari pemerintah.

¹⁰³ Pasal 29 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Bentuk kawal dan imbang dari pemerintah adalah dikeluarkannya UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta adanya lembaga khusus untuk mengawalnya yakni KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) dan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Jadi bila terjadi monopoli saham, pemerintah dapat melakukan pengimbangan dengan memberikan sanksi kepada subjek hukum yang melakukannya.

2. Faktor Kontrol Penegak Hukum

a. Pengertian Kontrol

Kontrol dalam banyak hal diartikan sebagai pengawasan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, arti kata kontrol adalah pengawasan= pemeriksaan, mengontrol adalah mengawasi, memeriksa.¹⁰⁴ Pengertian secara etimologi tersebut dirasa belum lengkap. Pengertian secara etimologi hanya menjelaskan makna kata dan tidak memberikan penjelasan realitasnya.

Oleh karena itu, perlu defenisi yang memeberikan gambaran lengkap mengenai realitas kontrol. Menurut Sujamto, dalam bahasa Indonesia fungsi kontrolling mempunyai padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan disini adalah pengawasan dalam arti sempit, yakni segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁰⁵ Sedangkan pengertian pengawasan, yaitu: sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau

¹⁰⁴ W.J. Poerwadarmita 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, disusun oleh, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: PN Balai Pustaka, hal 521

¹⁰⁵ Sujamto, 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 17

pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.¹⁰⁶ Kontral dalam tulisan ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menilai terjadinya monopoli saham atau tidak.

b. KPPU Sebagai Alat Negara Yang Mengontrol Kegiatan Usaha

Negara atas nama hukum harus terlibat atau ikut campur dalam kegiatan ekonomi para warganya. Karena menolong rakyat dan menciptakan rakyat menjadi masyarakat yang sejahtera merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara. Intinya campurtangan pemerintah dimaksudkan untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah terjadinya penumpukan atau konsentrasi ekonomi ke satu tangan (monopoli), mencegah dan mengatasi kalau terjadi krisis ekonomi.¹⁰⁷

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Negara dalam keterlibatannya dalam kegiatan ekonomi adalah menciptakan kondisi ekonomi yang memberikan kesempatan bagi pemerataan pendapat yang adil bagi seluruh rakyat. Penciptaan pemerataan tersebut tentu tidak akan terwujud bilamana terjadi suatu praktek ekonomi monopoli yang merugikan masyarakat.

Tugas Negara tersebut tentunya tidak dapat diserahkan kepada pertumbuhan secara alami dan mandiri di dalam pasar bebas. Sebab pasar bebas secara langsung pada dasarnya tidak menyediakan sistem pembagian pendapatan dan berusaha secara merata dan adil.

Badan yang berfungsi untuk mengontrol kegiatan usaha adalah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat dengan KPPU. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 24

¹⁰⁷ Deliarnova. 1995. *Op.cit*, hal 153

kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden, selaku Kepala Negara.

Tugas KPPU, dinyatakan dalam Pasal 35 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari tugas yang diberikan dalam huruf d, dalam Pasal 36 dijabarkan wewenang KPPU, sebagai berikut:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Tentunya dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, perlu suatu tata cara. Tata cara tersebut diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni sebagai berikut:

1) Pelapor

Yang dapat melaporkan telah terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak hanya pihak yang dirugikan saja, melainkan juga setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Penyampaian laporan harus dilakukan secara tertulis dengan memuat keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menerangkan berapa jumlah kerugian yang terjadi serta menyertakan identitas pelapor.

2) Pemeriksaan

Pasal 39 ayat (1) UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mewajibkan kepada KPPU untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan yang diterima. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak KPPU menerima laporan tersebut, KPPU wajib menetapkan perlunya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, maka dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan.

Sebagai jaminan atas diri pelapor, KPPU wajib merahasiakan identitas pelapor, terutama pelapor yang bukan pelaku usaha yang dirugikan. Demikian juga sebaliknya sebagai jaminan bagi pelaku usaha yang diperiksa, KPPU wajib untuk menjaga kerahasiaan atas segala informasi yang diperoleh KPPU dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.

Pelaku usaha dan atau pihak lain yang diperiksa wajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan. Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan atau menghambat proses penyelidikan dan atau pemeriksaan. Jika pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka KPPU wajib menyerahkan hal tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

Selanjutnya KPPU diwajibkan menyelesaikan pemeriksaan lanjutan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan. Jika diperlukan jangka waktu pemeriksaan lanjutan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Setelah itu KPPU wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan. Keputusan ini dilakukan dalam suatu sidang Majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota komisi¹⁰⁹.

3) Putusan KPPU

Putusan KPPU harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Pelaku usaha yang menerima pemberitahuan tersebut dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU.

4) Pelaksanaan dan Keberatan atas Putusan KPPU

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan atas putusan KPPU, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan dianggap telah menerima putusan KPPU, dan putusan KPPU tersebut akan berlaku sebagai putusan pada tingkat akhir (final) dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dan sebagai konsekuensinya putusan tersebut bersifat eksekutorial, dengan pengertian bahwa putusan tersebut dapat dimintakan pelaksanaan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Selanjutnya undang-undang menentukan bahwa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima

¹⁰⁹ Pasal 32 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengenai persyaratan keanggotaan Komisi

pemberitahuan putusan KPPU, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU. Jika putusan tersebut tidak dijalankan oleh pelaku usaa dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹⁰. Putusan KPPU tersebut berlaku sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan tersebut diterima. Pengadilan negeri harus memeriksa keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Selanjutnya jika terdapat keberatan atas putusan pengailan negeri, maka pihak yang keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri, dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dijatuhkan. Mahkamah Agung harus memberikan putusan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima.

¹¹⁰ Pasal 5 ayat (2) KUHAP, "Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik

c. Kontrol KPPU Pasif

Kontrol yang dilakukan oleh KPPU hanya bersifat pasif. KPPU hanya menunggu laporan dari masyarakat. Bila tidak ada laporan dari masyarakat maka KPPU tidak akan melakukan penyelidikan dugaan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Padahal pada Pasal 36 huruf b UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga memiliki kewenangan melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Penelitian tersebut dilakukan baik adanya laporan dari masyarakat atau pun tidak KPPU tetap melakukan penyelidikan bila KPPU menduga telah terjadi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Hasil penyidikan dan putusan KPPU dapat dilihat pada Katalog Putusan KPPU Periode 2000 – Agustus 2009. Dalam katalog tersebut pembaca akan melihat bahwa hampir semua putusan KPPU merupakan putusan yang dibuat karena adanya laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan hak-hak ekonominya.

Tidak ada inisiatif dari KPPU untuk melakukan penelitian mengenai dugaan terjadi monopoli, dari Katalog Putusan KPPU Periode 2000 – Agustus 2009 terlihat bahwa Keputusan KPPU banyak menyangkut masalah tender pengadaan barang. Permasalahan monopoli saham dapat dikatakan hanya satu yakni masalah *crossholding* yang dilakukan oleh PT. Tamasek terhadap perusahaan telekomunikasi di Indonesia (dengan nomor perkara No. 07/KPPU-L/2007).

Pangsa pasar Telkomsel dan Indosat secara bersama-sama terus mengalami peningkatan sejak terjadinya struktur kepemilikan silang sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

	Tahun	Pangsa Pasar Telkomsel dan Indosat secara Bersama-sama	Gabungan Pendapatan usaha (dalam miliar)	Pendapatan Usaha XL (dalam Miliar)	Pangsa Pasar XL
Periode Cross Ownership: 2003-2006	2001	76.34%	6,688	2,073.03	23.66%
	2002	83.58%	10,845	2,130.41	16.42%
	2003	88.09%	16,264	2,198.06	11.91%
	2004	89.74%	22,107	2,528.48	10.26%
	2005	90.97%	29,778	2,956.38	9.03%
	2006	89.64%	38,373	4,437.17	10.36%
	Rata-rata 2003-2006	89.61%			

Sumber: Katalog Putusan KPPU Periode 2000 – Agustus 2009

Adanya kemampuan pengendalian yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Temasek terhadap Telkomsel dan Indosat menyebabkan melambatnya perkembangan Indosat sehingga tidak efektif dalam bersaing dengan Telkomsel yang berakibat tidak kompetitifnya pasar industri seluler di Indonesia.

Perlambatan perkembangan Indosat ditandai dengan pertumbuhan BTS yang secara relatif menurun dibanding dengan Telkomsel dan XL yang merupakan dua operator besar lainnya di Indonesia. Struktur kepemilikan silang Kelompok Usaha Temasek menyebabkan adanya *price-leadership* (penentu harga) dalam industri telekomunikasi di Indonesia. Telkomsel sebagai pemimpin pasar kemudian telah menetapkan harga jasa telekomunikasi seluler secara eksekutif. Konsekuensi dari eksekutif profit adalah

operator menikmati ekseseif profit dan konsumen mengalami kerugian (*consumer loss*). Perhitungan yang dilakukan Majelis Komisi menunjukkan kerugian yang dialami oleh konsumen layanan telekomunikasi seluler di Indonesia sejak tahun 2003 sampai dengan 2006 berkisar dari Rp 14,76498 Triliun sampai dengan Rp 30,80872 Triliun. Namun sesuai dengan ketentuan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi dalam perkara ini tidak berada pada posisi yang berwenang menjatuhkan sanksi ganti rugi untuk konsumen. Selanjutnya selama berlangsungnya sidang, Majelis Komisi tidak menemukan adanya bukti-bukti bahwa Telkomsel telah membatasi perkembangan teknologi dalam industri seluler di Indonesia sehingga tidak melanggar Pasal 25(1) b UU Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh selama Sidang Majelis, pada 19 November 2007 Majelis Komisi memutuskan:

- 1) Menyatakan bahwa Temasek Holdings, Perseroan. Ltd. bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia Perseroan. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Perseroane. Ltd, Asia Mobile Holdings Perseroan. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Perseroan. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Perseroan. Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 27 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999;
- 2) Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999;

- 3) Menyatakan bahwa PT. Telekomunikasi Selular tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999;
- 4) Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Perseroan. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Perseroan. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Perseroan. Ltd, Asia Mobile Holdings Perseroan. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Perseroan. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Perseroan. Ltd untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT. Telekomunikasi Selular dan PT. Indosat, Tbk. dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT. Indosat, Tbk. dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- 5) Memerintahkan kepada Temasek Holdings, Perseroan. Ltd., bersama-sama Singapore Technologies Telemedia Perseroane. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Perseroan. Ltd, Asia Mobile Holdings Perseroane. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Perseroane. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Perseroane. Ltd untuk memutuskan perusahaan yang akan dilepas kepemilikan sahamnya serta melepaskan hak suara dan hak untuk mengangkat direksi dan komisaris pada salah satu perusahaan yang akan dilepas yaitu PT. Telekomunikasi Selular atau PT.Indosat, Tbk. sampai

dengan dilepasnya saham secara keseluruhan sebagaimana diperintahkan pada diktum nomor 4 di atas;

- 6) Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada diktum nomor 4 di atas dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a) untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas;

- b) pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings, Perseroane. Ltd. maupun pembeli lain dalam bentuk apa pun

- 7) Menghukum Temasek Holdings, Perseroane. Ltd., Singapore Technologies Telemedia Perseroane. Ltd., STT Communications Ltd., Asia Mobile Holding Company Perseroane. Ltd, Asia Mobile Holdings Perseroane. Ltd., Indonesia Communication Limited, Indonesia Communication Perseroane. Ltd., Singapore Telecommunications Ltd., dan Singapore Telecom Mobile Perseroane. Ltd masing-masing membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha)

- 8) Memerintahkan PT. Telekomunikasi Selular untuk menghentikan praktek pengenaan tarif tinggi dan menurunkan tarif layanan selular sekurang-kurangnya sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang berlaku pada tanggal dibacakannya putusan ini;

- 9) Menghukum PT. Telekomunikasi Selular membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

3. Faktor Kultural

a. Sifat Kerukunan

Masyarakat Indonesia mewarisi nilai-nilai dalam hukum adat yang dibangun atas dasar kebersamaan, kerukunan, kekeluargaan, keselarasan, dan gotong royong. Nilai-nilai warisan adat tersebut telah diangkat menjadi konsep ekonomi yang dijabarkan dalam kehidupan Negara dan bernegara¹¹¹. Dalam praktek dilapangan, berikut diutarakan contoh masyarakat Jawa dan masyarakat Minang.

Masyarakat Jawa sangat menjunjung prinsip kerukunan dalam berusaha. Prinsip kerukunan tersebut bertujuan untuk mempertahankan masyarakat agar tetap dalam keadaan yang harmonis. Rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang, dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk membantu. Rukun merupakan keadaan ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan sosial. Tuntutan kerukunan merupakan kaidah penata masyarakat yang menyeluruh dan segala apa yang dapat mengganggu keadaan rukun dan

¹¹¹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hal 89

suasana keselarasan dalam masyarakat harus dicegah.¹¹² Makanya dalam masyarakat Jawa mengenal istilah *mangan ora mangan asal ngumpul* (makan tidak makan asal kumpul).

Sedangkan masyarakat Minang, yang mengenal tradisi marantau.¹¹³ Dimana untuk dapat bertahan dirantau orang Minang dikenal dengan sifatnya yang suka *manggaleh* (berdagang). Yang mana dalam berusaha (*manggaleh*) orang Minang memperhatikan kerukunan dengan masyarakat sekitar. Hal ini dijiwai oleh falsafah *di mano bumi dipijak disinan langit dijunjung* (dimana bumi dipijak disana langit dijunjung). Makanya dalam merantau dan berdagang hampir tidak pernah didengar orang Minang yang bertengkar dengan masyarakat setempat. Orang Minang selalu mengatakan kebesaran adat dan budayanya adalah karena rasa kekerabatannya yang tinggi, rasa solidaritasnya yang kental rasa kebersamaan sehingga ranah Minang terkenal sebagai lambang demokrasi dengan semangat kegontongroyongan.¹¹⁴

Dari kedua etnis ini dalam memandang persaingan hampir sama. Karena persaingan merupakan kata yang berkonotasi negatif yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan keselarasan dan kebersamaan. Alasannya, dalam masyarakat kekeluargaan yang mengutamakan keselarasan dan gotong royong, persaingan senantiasa dikaitkan dengan penyimpangan terhadap prinsip kerukunan dan keselarasan karena persaingan dianggap sebagai tindakan individual yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri serta mengorbankan kepentingan orang banyak. Jika dikaitkan dengan persaingan

¹¹² Franz Magnis-Suseno. 1985, *Etika Jawa, Sebuah Analisis Falsafah Tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia, hal 39-40

¹¹³ H. CH. N. Latief. 2002. *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Hari Depan*. Bandung: Angkasa, hal 47

¹¹⁴ *Ibid*, hal 59

dalam perdagangan tindakan untuk melakukan persaingan sering dihubungkan dengan berbagai praktik penyimpangan dalam upaya mengusir pesaing yang ada bagi kepentingan individu.

Sifat keselarasan dan gotongroyong tersebut ternyata membuka peluang terjadinya monopoli. Monopoli yang terjadi bersifat kekeluargaan atau kedaerahan. Karena masyarakat yang bersifat gotongroyong tersebut akan lebih dapat melakukan kerjasama dengan daerah asalnya yang tentunya membawa suatu pasar dikuasai oleh satu etnis tertentu. Monopoli semacam ini bisa terjadi, karena faktor alamiah (karakteristik) masyarakat itu sendiri.

Gambaran di atas merupakan bentuk monopoli pasar, namun bila dikaitkan dengan monopoli saham, para subjek hukum yang akan membentuk perseroan hanya dengan sesamanya (kedaerahan). Kemudian mereka membagi saham dari pendirian perseroan tersebut, dan ditentukan siapa yang memiliki saham yang mayoritas (yang mendapatkan saham strata utama).

Monopoli saham di atas, hanya dalam bentuk pendirian. Lain hal dengan monopoli saham yang terjadi karena akuisisi saham. Subjek hukum yang memiliki finansial besar akan mengambil alih (mengakuisisi) saham suatu perseroan guna memperkuat rasa kekeluargaan diantara pemilik perseroan yang tentunya nantinya bermuara pada penguasaan pasar. Akibat yang terjadi dari tindakan para subjek hukum tersebut adalah harga barang dan jasa dapat ditentukan berdasarkan keinginan mereka (orang yang melakukan monopoli tersebut).

b. Perusahaan Keluarga

Perusahaan di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak berbeda dengan perusahaan di Asia pada umumnya. Perusahaan-perusahaan di Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan yang dimiliki dan dikontrol oleh keluarga. Meskipun perusahaan tersebut tumbuh dan menjadi perusahaan publik, namun kontrol tetap dipegang oleh keluarga masih signifikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Claessens, Stijin, Simeon Djankov dan Larry H.P ditemukan bahwa dalam tahun 1996 kapitalisasi pasar dari saham yang dikuasai oleh 10 perusahaan keluarga di Indonesia mencapai 57,7%. Untuk Filipina dan Thailand mencapai 52,5% dan 46,2%. Sedangkan kapitalisasi pasar dari saham yang dikuasai oleh 15 perusahaan keluarga di Korea sebesar 38,4% dan Malaysia sebesar 28,3%.¹¹⁵

Pemegang saham yang memiliki kontrol (strata saham utama) sebenarnya memiliki insentif secara lebih dekat untuk memonitor perusahaan serta manajemen yang memberikan pengaruh positif bagi *corporate governance*. Sebaliknya, pemegang saham pengendali (strata saham utama) juga berpotensi untuk berkonflik dengan pemegang saham lain, khususnya pemegang saham strata menengah dan pemegang saham bawah. Konflik ini akan memberikan akibat buruk ketika pengendali perusahaan melakukan eksploitasi perusahaan yang dikontrolnya dengan biaya (*cost*) yang juga di tanggung para pemegang saham lain, khususnya para pemegang saham strata menengah dan pemegang saham strata bawah. Hal ini terkait dengan tata cara penggunaan laba dan dividen.

¹¹⁵ <http://www.google.perusahaan.keluarga-christian.herdinanta-139-thty.html>, diakses tanggal 10 Juni 2008

Tingginya konsentrasi pemilik (*concentration ownership*) perusahaan dapat diasumsikan bahwa tingginya konsentrasi kepemilikan saham akan ditemui pada kondisi dimana hak milik perorangan tidak mampu dilindungi oleh negara. Dengan tidak adanya perlindungan dari negara, maka pengendali perusahaan akan mendapatkan kekuasaan (*power*) melalui *voting right* dan isentif melalui tingginya *cash flow right* (hak mendapat keuntungan).

Bila kita lihat dari sisi positif, kekuasaan yang besar dari pemilik perusahaan itu berguna mempengaruhi negosiasi dan pelaksanaan kontrak-kontrak perusahaan terhadap para *stakeholders*, termasuk pemegang saham strata menengah dan strata saham bawah, para manajer, para supplier, tenaga kerja, kreditor, konsumen, dan pemerintah. Disisi lain akan berdampak negatif karena negara tidak dapat melindungi hak pribadi, dimana tingginya konsentrasi kepemilikan perusahaan khususnya dominasi oleh group bisnis keluarga akan menghadapi kendala berupa lemahnya sistem hukum, penegakkan hukum, dan korupsi. Bisnis group dan pengendalian oleh keluarga merupakan cara yang digunakan untuk melakukan transaksi-transaksi dimana biaya transaksi antara perusahaan keluarga atau terafiliasi akan mengurangi kadar keterbukaan informasi yang mana hal itu tidak akan terjadi jika transaksi dilakukan dengan pihak diluar dalam hubungan keluarga maupun afiliasi.

Dari Tabel 1 dibawah ini memperlihatkan 90% *listed company* yang ada mempunyai pengendali, dengan rata-rata 87% dan pengendali yang dominan berasal dari pihak keluarga atau individu.

Tabel 1. Ultimate Kontrol of Publicly Traded Companies in Selected Countries¹¹⁶

Country	Widely Held	Controlling Shareholder			
		Family	State	Widely Held Financial	Widely Held Corporation
Argentina	0.0	65.0	15.0	5.0	15.0
Meksiko	0.0	100.0	0	0	0
Cina Taipei	26.2	48.2	2.8	5.3	17.4
Hongkong	7.0	66.7	1.4	5.2	19.8
Indonesia	5.1	71.5	8.2	2.0	13.2
Korea	43.2	48.4	1.6	0.7	6.1
Malaysia	10.3	67.2	13.4	2.3	6.7
Filipina	19.2	44.6	2.1	7.5	26.7
Singapura	5.4	55.4	23.5	4.1	11.5
Thailand	6.6	61.6	8.0	8.6	15.3
Average	12.3	62.8	7.6	4.1	13.2

Sumber: <http://www.google.perusahaan keluarga-christian herdinanta-139-thty.html>

Karakteristik perusahaan keluarga tersebutlah yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena perusahaan tersebut hanya dikuasi oleh satu group perusahaan (satu keluarga saja).

Dalam sistem perusahaan keluarga tersebut akan memberikan tampuk kepemimpinan perusahaan hanya kepada kalangan keluarganya saja. Bila tidak satu keluarga atau keturunan maka ia tidak dapat menjadi pemimpin. Demikian pula halnya dalam memperluas usaha, perusahaan yang dikembangkan tersebut juga diurus oleh satu keturunan atau satu marga (keluarga).

Sifat kekeluargaan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diartikan secara negatif atau telah dipelintir oleh pelaku usaha bahwa sifat kekeluargaan tersebut berarti perekonomian disusun

¹¹⁶ *Ibid*

atas dasar keluarga pribadi saja tanpa mengikut sertakan pihak lain (keluarga lain). Inilah yang memperburuk perekonomian Indonesia untuk masa sekarang dan untuk masa mendatang. Karena perekonomian disusun oleh beberapa keluarga saja, sehingga perekonomian menjadi rapuh.

4. Faktor Luar Negeri

a. Globalisasi

Faktor luar negeri sangat berperan penting dalam menciptakan monopoli saham perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya globalisasi. globalisasi sebagai suatu fenomena perubahan yang terjadi secara menyeluruh, dirasakan secara kolektif, dan mempengaruhi banyak orang (lintas wilayah-lintas negara) yang mempengaruhi gaya hidup dan lingkungan. globalisasi adalah dunia yang terhubung (*connected world*) seolah tanpa batas.

Faktor globalisasi ini yang tanpa batas ini, membuat orang dengan mudah berpindah dari satu wilayah atau suatu Negara ke wilayah atau Negara lain. Tidak hanya orang yang mudah untuk berpindah, uang atau modal pun dengan mudah dapat berpindah. Hal ini terjadi karena didukung oleh perkembangan teknologi, transportasi dan telekomunikasi yang luar biasa.

Korporasi besar dunia atau *Trans National Corporation* (TNC) atau *Multi National Corporation* (MNC)¹¹⁷ memainkan peranan penting dalam

¹¹⁷ Menurut PBB, *Multinational corporation are enterprises which own or control production or service facilities outside the country in which they are based. Such enterprises are not always incorporated or private; they can also be cooperative or state owned entities.* (Sumantoro. 1987.

globalisasi. Korporasi besar tersebut terus mengembangkan jaring-jaringnya ke Negara-negara di dunia ini. Yang tentunya nantinya akan bermuara terjadi suatu monopoli dalam suatu Negara yang menjadi salah satu tujuan mereka. Artinya dengan adanya globalisasi dan korporasi besar dunia (TNC atau MNC) ini mempercepat terjadi suatu monopoli.

Salah satu cara yang dilakukan oleh korporasi besar dunia atau *Trans National Corporation* (TNC) atau *Multi National Corporation* (MNC) untuk membuka jaringnya adalah dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan target suatu Negara. Bahkan target perusahaan yang diakuisisi atau diambilalih tersebut tak jarang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang atau pasar yang sama. Ini berarti, monopoli saham yang terjadi tidak hanya melingkupi dalam negeri dari pelaku usaha berusaha tapi juga telah merambah ke luar dari Negara pelaku usaha. Hal inilah yang dapat kita lihat dalam kasus penguasaan saham telekomunikasi di Indonesia oleh perusahaan asal Singapura (Temasek Holdings) sebagaimana telah penulis jabarkan dalam pembahasan sebelumnya.

b. Perdagangan Bebas

Setiap subjek hukum di dunia ini berhak untuk melakukan perdagangan. Perdagangan yang terjadi tidak hanya dalam Negeranya saja tetapi telah lintas Negara. Apalagi sekarang Negara-negara untuk mendukung terciptanya suatu perdagangan bebas di dunia telah menciptakan suatu organisasi yang diberi nama WTO (*World Trade Organization*).

WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antarnegara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Dalam WTO tersebut ada beberapa prinsip yang harus dijalankan oleh Negara anggotanya yang berpeluang besar terjadi monopoli saham pada suatu Negara target oleh pelaku usaha asing, diantaranya:

1) Prinsip Most-Favoured-Nations (MFN)

Prinsip *Most-Favoured-Nations* ini termuat dalam Pasal I GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya.

Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada sesama anggota GATT. Oleh karena itu suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya prinsip ini mendapat pengecualian-

pengecualiannya, khususnya dalam menyangkut kepentingan negara yang sedang berkembang.

Prinsip inilah yang menjiwai lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut dengan prinsip *Most-Favoured-Nations* (nondiskriminatif) sehingga para penanam modal (investor/pelaku usaha) baik dalam negeri dan luar negeri diperlakukan sama. Alhasil, para subjek hukum yang berkedudukan di luar negeri (atau warga Negara asing) dapat bebas melakukan penanaman modal di Indonesia. Yang paling mudah berinvestasi tersebut adalah dengan cara melakukan pembelian saham-saham perusahaan Indonesia yang baik.

2) Prinsip National Treatment

Prinsip *National Treatment* terdapat dalam Pasal III GATT. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini sifatnya berlaku luas. Prinsip ini juga berlaku terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya. Ia berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk dipasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.

Prinsip *National Treatment* dan prinsip MFN merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya dalam GATT. Kedua prinsip ini diberlakukan pula dalam *General Agreement on Trade in Service* (GATS). Dalam GATS, negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk memberlakukan perlakuan yang sama terhadap jasa-jasa atau para pemberi jasa dari suatu negara dengan negara lainnya.

Modal termasuk juga barang yang diperdagangkan yang tidak boleh dibedakan antara modal dalam negeri dan luar negeri hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang tidak membedakan antara modal asing dan modal dalam negeri. Dari penamaan undang-undangnya saja sudah terlihat tidak ada perbedaan tersebut. Kalau diperhatikan penanaman undang-undang penanan modal sebelumnya terdapat perbedaan ada dua undang-undang yang mengatur mengenai penanaman modal yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahandan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

3) Prinsip Larangan Restriksi (Pembatasan) Kuantatif

Dalam prinsip ini tidak ada larangan pembatasan terhadap pelaku usaha melakukan perdagangan pada Negara anggota WTO. Oleh karena itu dengan prinsip ini pelaku usaha asing bebas tanpa batasan melakukan perdagangan, salah satu bentuknya adalah melakukan akuisisi atau pengambilalihan perusahaan di Indonesia guna memperluas dan mempermudah perdagangan mereka. Akibat dari prinsip ini, pelaku usaha asing bebas melakukan tindakan pengambilalihan saham perusahaan-perusahaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup.

B. Dampak Negatif Praktek Monopoli Saham Perseroan Terbatas

Praktek monopoli saham perusahaan banyak sekali efek atau dampak negatif yang dimilikinya. efek negatif yang ditimbulkan dari praktek monopoli saham perusahaan bersifat multidimensi. Berikut dijabarkan mengenai akibat dari praktek monopoli saham perusahaan tersebut, yakni:

1. Bagi Pemerintahan

Bila terjadi praktek monopoli saham perusahaan nantinya akan bermuara pada praktek monopoli pasar. Bila hal tersebut terjadi maka akan mempengaruhi perekonomian suatu Negara baik secara mikro maupun secara makro. Dengan kekuatan monopoli saham yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Bahkan bila kita berfikir lebih radikal, pemerintahan akan diatur atau diintervensi oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli saham tersebut.

Hal di ataslah yang ditakuti oleh pemerintah. Bila pemerintah telah di atur atau diintervensi oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli saham tersebut maka idependensi pemerintahan tidak ada lagi, sehingga pemerintahan dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih cenderung menguntungkan kepada pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli saham dari pada kepentingan rakyat. Ini berarti, dengan praktek monopoli saham tersebut kemerdekaan dan kesejahteraan yang dicita-citakan oleh para bapak pendiri bangsa yang dituangkan dalam dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan sulit untuk terwujud.

2. Bagi Konsumen

Bila terjadi praktek monopoli saham perusahaan, pihak yang paling pertama sekali yang mengalaminya tentunya konsumen. Berikut akibat yang akan dialami oleh konsumen bila terjadi praktek monopoli saham Perusahaan:

1) Harga Semakin Tinggi

Karena pelaku usaha yang menguasai perusahaan hanya pelaku usaha tertentu. Maka pelaku usaha tersebut tentunya dapat mengatur kebijakan perusahaan dalam proses produksi dan penjualan. Sehingga hukum pasar mengenai "*supply* dan *demand* (penawaran dan permintaan) akan menjadi terganggu. Bila permintaan meningkat sedangkan barang yang tersedia terbatas tentunya harga dari barang tersebut akan menjadi tinggi.

2) Hak Memilih Dikebiri

Bila terjadi monopoli saham perusahaan, akan membuat pelaku usaha yang memiliki kekuatan tersebut menjadi sentralistik dan membuat pilihan hanya terbatas tanpa banyak alternatif pilihan bagi konsumen. Artinya pelaku

usaha tersebut menggiring konsumen untuk tidak dapat melakukan pilihan barang yang lebih baik.

3. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang tidak memiliki kekuatan monopoli saham perusahaan akan menjadi tidak berdaya. Akibatnya pelaku usaha yang mencoba memasuki pasar atau yang mencoba bertahan dalam pasar tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli. Alhasil, satu persatu pelaku usaha yang tumbuh dan ingin melakukan persaingan dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli tersebut menjadi mati.

4. Bagi Masyarakat Secara Umumnya

Bila terjadi praktek monopoli saham perusahaan akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Di samping itu juga akan terjadi jurang pemisah yang sangat dalam antara si miskin dan si kaya. Karena pelaku usaha yang memiliki kekuatan monopoli tersebut akan mensesot kekayaan dari masyarakat sekitarnya. Akibat yang paling parah yang terdapat pada masyarakat adalah terjadinya krisis sosial dalam bentuk meningkatnya kriminalitas, sehingga masyarakat menjadi tidak nyaman.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan saham perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan asas demokrasi ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun asas-asas demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diramu menjadi enam asas, yakni: asas kekeluargaan, asas penguasaan negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak, asas hak milik perorangan dan hak milik umum, asas keadilan sosial, asas musyawarah mufakat, dan larangan praktek monopoli.

Asas-asas demokrasi ekonomi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disinkronisasikan dalam pengaturan saham di Indonesia terlihat bahwa pengaturan saham lebih condong bersifat kapitalis tanpa memperhatikan asas-asas demokrasi ekonomi yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hanya satu asas yang dengan asas demokrasi ekonomi dalam pengaturan saham yakni larangan praktek monopoli saham. Larangan tersebut tersebut tercermin dalam Pasal 27 UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya praktek monopoli saham perusahaan, digolongkan dalam tiga kelompok:

1. Faktor undang-undang, yang mana perundang-undangan yang dilahirkan oleh pemerintah dan legislatif terdapat ketidak sinkron asas-asas dalam Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan undang-undangan khususnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketidak sinkronan tersebut baik bersifat vertikal (undang-undangan dengan peraturan dibawahnya) maupun horizontal (undang-undangan dengan undang-undang).

2. Faktor kontrol penegak hukum yang lemah. Kontral terhadap terjadinya monopoli saham adalah KPPU. KPPU dalam melakuakn kontrak terhadap dugaan terjadinya monopoli saham tergantung dari laporan dari masyarakat. Dengan demikian KPPU dapat bertindak melakukan penyidikan bila ada laporan bila tidak ada maka KPPU tidak melakukan penyidikan. Dari hasil keputusan KPPU dari tahun 2000 sampai tahun 2008 terlihat bahwa putusan KPPU tentang terjadinya monopoli saham hanya satu putusan. Kebanyakan putusan KPPU tentang tender atau pengadaan barang.
3. Faktor Kultural yang negatif. Dalam masyarakat Indonesia ada beberapa faktor kultur yang dapat menimbulkan terjadinya monopoli saham yaitu sifat kerukunan dan perusahaan keluarga. Karena sifat kerukunan ini masyarakat biasanya mengabaikan saja sesuatu hal dan tidak mau konflik dengan orang lain. Kemudian perusahaan-perusahaan di Indonesia banyak yang dikelola secara kekeluargaan. Sehingga bila keluarganya yang melakukan monopoli saham maka perbuatan tersebut akan diabaikan dan didiamkan saja.
4. Faktor luar negeri. Globalisasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya monopoli saham. Karena perusahaan besar atau *Trans National Corporation* (TNC) atau *Multi National Corporation* (MNC) melakukan pengembangan jaringan usahanya salah satunya dengan akuisisi atau pengambilalihan saham perusahaan Negara yang menjadi target. Di samping

faktor globalisasi, faktor perdagangan bebas juga memainkan peran terjadinya monopoli saham. Dalam perdagangan bebas para pelaku usaha asing dengan gampang masuk ke Negara yang menjadi targetnya, apalagi perdagangan bebas tersebut telah dilegitimasi oleh organisasi internasional yakni WTO. Yang mana dalam WTO tersebut ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh para Negara anggota.

Praktek monopoli saham perseroan terbatas yang dilakukan oleh pelaku usaha membawa dampak negatif yang bersifat multidimensi. Artinya, dengan adanya praktek monopoli saham banyak aspek kehidupan yang akan terganggu seperti terganggunya kinerja pemerintah, sengsaranya para konsumen, tak berdayanya pelaku usaha yang lain (lemah), dan terjadi krisis sosial dalam masyarakat dalam bentuk besarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin serta angka kriminalitas akan semakin meningkat.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini perlu diberikan saran untuk permasalahan pertama bagi lembaga legislatif untuk segera melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya untuk:

1. Pasal 62, karena tidak sesuai dengan asas keadilan. Sebab nilai harga yang wajar tidak dijabarkan dalam undang-undang.
2. Pasal 84, karena pasal ini membuka peluang untuk mengebiri asas musyawarah mufkat, asas keadilan. Karena orang yang mempunyai saham belum tentu memiliki hak suara.

3. Pasal 87, karena pasal ini menutup kemungkinan dilakukan musyawarah untuk mufakat, karena pada ayat kedua dimungkinkan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara. Sehingga asas musyawarah tidak terlaksana dengan efektif.
4. Pasal 97 ayat (6), karena pasal tersebut membatasi hak minoritas. Sehingga keadilan bagi pemegang saham bawah tidak dapat berbuat banyak bila ia dizalimi oleh pemegang saham utama.
5. Pasal 114 ayat (6), pasal tersebut sangat lemah, karena pemegang saham bawah tidak dapat berbuat banyak. Dan dapat saja komisaris telah melakukan kerja sama dengan Pemegang saham utama. Dan penentuan tersebut terkendala terhadap jumlah.
6. Pasal 126, karena pada pasal ini terdapat larangan namun larangan tersebut bila tetap dilaksanakan tidak membawa konsekuensi hukum berupa berupa penghentian perbuatan hukum (penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan).

Kemudian untuk permasalahan kedua, saran ditujukan kepada pemerintah, supaya pemerintah meningkatkan perannya (ikut campur) dalam perekonomian dengan jalan memaksimalkan kinerja dari KPPU. Sehingga praktek monopoli saham dapat diidentifikasi atau diterdeksi sejak dini. Tujuan akhir dari keterlibatan atau ikut campur Negara dalam perekonomian tentunya untuk menguntungkan warga Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo. 2004. *Metode dan Jalan Dalam Bidang Ilmu Sosial*. Padang: Kopertis Wilayah X, hal 6-8
- Adrianus Meliala. 1995. *Menyingkap Kejahatan Krah Putih (White Collar Crime)*. Cet II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- A. Hanan Hardjasmita. 1982. *Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia dan Perkembangannya Sampai Dengan Awal Periode 80an*. Bandung: CV Armico
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2002. *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*. Cet III. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- A.M. Tri Aggraini. *Penerapan Pendekatan "Rule Of Reason" Dan "Per Se Illegal" Dalam Hukum Persaingan*. Dalam Jurnal Hukum Bisnis. Volume 24-No 2 – Tahun 2005
- Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bryan A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary*. Seventh Edition. United States of America: West Publishing Co
- Budiono Kusumohamidjojo. 2004. *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil*. Jakarta: Grasindo
- Christianto Wibisono. 1989. *Sepak Terjang Konglomerat*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT SUN Printing
- Didik J. Rachbini. 1990. *Politik Pembangunan Pemikiran ke Arah Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: LP3S
- Deliarnova. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- . 2003. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet III
- Dominick Salvatore. 1995. *Teori MikroEkonomi Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga

- Edilius dan Sudarsono, 1994. *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta
- Franz Magnis- Suseno. 1985, *Etika Jawa, Sebuah Analisis Falsafah Tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia
- Gunarto Suhardi. 2002. *Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Hadari Nawawi. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- H. CH. N. Latief. 2002. *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Hari Depannya*. Bandung: Angkasa
- H. Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu. 2001. *1000 Pepatah Petitih, Mamang, Bidal, Pantun, Gurindam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, Cet V
- Henry Campbell Black. 1990. *Black's Law Dictionary*. Sixth Edition, St. Paul, Minn, West Publishing Co.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang: In-Trans Publising
- Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet II. Malang: Bayumedia Publising
- . 2007. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implementasi Penerapannya di Indonesia*. Cet II, Malang: Bayumedia Publishing
- Kamus Khusus Pasar Modal dan Uang. 1974. Jakarta. Departemen Keuangan RI-Badan Pelaksana Pasar Modal
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka
- Kirdi Dipoyudo. 1985. *Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 1 Keadilan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali
- Komaruddin, 1982, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*, Jakarta: Alumni

- Kwik Kian Gie. 1996. *Praktek Bisnis dan Orientasi ekonomi Indonesia*. Bandung: Bitra Aditya Bakti
- Lili Rasjidi, 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta
- Mohammad Hatta, 1979. *Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis*, Jakarta: Mutiara
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2001. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 2005. *Perlindungan Saham Minoritas*. Bandung: CV. Utomo
- N.H.T. Siahaan, 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen dan Pertanggungjawaban Produk*, Jakarta: Panta Rei
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Rachmat Soemitro. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*. Bandung: PT. Eresco
- Robert A. Dahl. 1992. *Demokrasi Ekonomi Sebuah Pengantar*. Terj. Ahmad Setiawan Abadi, Jakarta: Yayasanab Obor Indonesia
- Roscoe Pound, 1978, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara
- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sjahrir. 1991. *Analisis Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- _____. 1992. *Refleksi Pembangunan Ekonomi Indonesia 1968-1992*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Sri Redjeki Hartono. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju

Sumantoro. 1987. *Kegiatan Perusahaan Multinasional Problema Politik, hukum, dan Ekonomi Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gramedia

Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, hal 65-66

Winardi, 1996. *Istilah Ekonomi Dalam 3 Bahasa. Inggris-Belanda-Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

Yulfasni. *Eksistensi Perusahaan Konglomerat Menurut Pasal 33 UUD 1945*. Jurnal Penelitian Andalas, No 14/September/Tahun VI/ 1993

Yoserwan. 2006. *Hukum Ekonomi Indonesia Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*. Padang: Andalas University Press

Zaim Saidi. 1996. *Konglomerat Samson-Delillah: Menyingkap Kejahatan Perusahaan*. Bandung: Mizan

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40

Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi_dan_perekonomian_Indonesia, tanggal 15 Oktober 2009

<http://beritapendidikan.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=13&artid=833>, diakses tanggal 16 Maret 2009

<http://www.google.com/mekanisme-kawal-dan-imbang-dalam-pemerintahan-daerah.pdf>, diakses tanggal 10 Mei 2009

http://www.google.perusahaan_keluarga-christian_herdinanta-139-thty.html, diakses tanggal 10 Juni 2008



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Padang, Sumatera Barat, pada tanggal 17 Juni 1985, dari ibu yang bernama Enni Roswati dan ayah Idris.

Penulis berhasil menyelesaikan kuliah S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang pada bulan April tahun 2007. Kemudian mengambil pendidikan advokat di Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Pada Januari 2009 penulis lulus tes advokat. Sekarang magang sebagai Advokat Magang di Anggrek Law Firm untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebelumnya penulis juga pernah magang di A. Waldemar & Partners selama satu tahun tiga bulan.

Penulis juga aktif menulis di media masa seperti di Koran Padang Ekspres, Singgalang dan Haluan dengan nama pena Doni F. Jambak. Penulis juga memasukan tulisan di website-website, di samping penulis juga memiliki blog tersendiri yang memuat ide-ide penulis dan blog untuk memberikan bantuan hukum pada masyarakat berupa konsultasi hukum. Nama blog yang penulis miliki adalah: www.jasahum.blogspot.com dan www.donifjambaksh.blogspot.com.

Padang, Januari 2010

Penulis,

Doni Fitra